



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 4 TAHUN : 1995 SERI : A NO : 1**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 1994**

**TENTANG  
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TAHUN 1994/1995-1998/1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa pelaksanaan Pembangunan lima tahun kelima Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang telah dilaksanakan dengan berpodoman pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Surakarta perlu lebih dimantapkan dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan pembangunan daerah;
  - b. Bahawa Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Surakarta tahun 1994/1995 – 1998/1999 yang garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Lima tahun keenam daerah diarahkan untuk dapat mewujudkan landasan yang kokoh dalam memasuki tahap awal era Pembangunan Jangka Panjang Kedua sebagai penjabaran GBHN tahun 1993;

- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1989 dan selanjutnya menetapkan pola dasar Pembangunan daerah Kotamadya DAerah Tingkat II Surakarta tahun 1994/1995-1998/1999 yang memberikan kejelasan arah Pembangunan Lima Tahun Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 TAhun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa BARat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
3. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jo keputusan menteri dalam negeri nomor 185 tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
7. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
8. Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 5 tahun 1993 tentang pedoman penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 tahun 1994 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II SURakarta Nomor 9 Tahun

1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 nomor 9);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TAHUN 1994 / 1995 – 1998 / 1999.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada daarnya terdiri dari Pembangunan Jangka Panjang Kedua daerah dan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Pembangunan Daerah
  - BAB III : Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
  - BAB IV : Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah
  - BAB V : Pelaksanaan
  - BAB VI : Penutup
- (3) Isi, uraian dan perincian sebgaiamana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang merupakan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud Pasal 1 ayat (1) Peraturan daerah ini merupakan garis-garis besar Kebijakan Pembangunan dan merupakan arah serta pedoman untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di kotamadya Darah Tingkat II Surakarta.

## Pasal 3

Berdasarkan Pola Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan rencana umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal 28 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap.

Ttd.

Cap

ttd

Drs. MARNO. D.

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  
Nomor 11 Tanggal 13 Desember Tahun  
1995 Seri D No. 7.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap. Ttd.  
Drs. SOEPARMAN. R.  
Pembina  
NIP : 500 040 992

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I

Tanggal : 23 Oktober 1995 No.  
188.3/318/1995.

An. SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum  
Ymt.  
Cap. Ttd

DIAH ANGGRAENI, SH.  
Nip. 500 056 003  
Kabag. Hukum Daerah Bawahan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG  
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TAHUN 1994/1995-1998/1999

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pembangunan lima tahun kelima Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Surakarta.

Untuk lebih memantapkan dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan Pembangunan daerah, maka untuk pelaksanaan Pembangunan lima tahun keenam (1994-1999) perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan bentuk Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 5 : cukup jelas

NASKAH  
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah Pokok-pokok kebijakan Pembangunan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan merupakan pernyataan kehendak masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam rangka melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah penjabaran lebih lanjut dari Garis-garis Besar Haluan Negara. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah, yang disesuaikan dengan kondisi potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang serta prioritas pembangunan didaerah, dalam rangka perwujudan Pembangunan Nasional di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Aparatur Pemerintah pusat dan Aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Aparatur Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan oleh masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam Jangka Menengah Lima Tahun dan dalam Jangka Panjang 25 Tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat dicapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

C. LANDASAN

Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta disusun berdasarkan Pancasila sebagai landaan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara,

Pola dasar Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagai landsan operasional.

#### D. RUANG LINGKUP

Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan gambaran masa depan yang diinginkan serta upaya pencapaiannya yang materinya mencakup seluruh aspek pembangunan dilakukan di daerah dalam jangka lima tahun maupun dalam jangka panjang 25 tahun.

Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta disusun dengan urutan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH
- BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
- BAB V : PELAKSANAN
- BAB VI : PENUTUP



## BAB II

### PEMBANGUNAN DAERAH

#### A. KONDISI DAN POTENSI DAERAH

Kondisi dan potensi daerah merupakan faktor-faktor dominan yang dapat didayagunakan untuk memperlancar pencapaian sasaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Kondisi dan posisi sebagai akumulasi hasil pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dapat dilihat dalam bidang-bidang pembangunan sebagai berikut :

##### 1. Kondisi

###### a. Bidang Ekonomi

###### **Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik regional Bruto)**

PDRB Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1985 atas dasar harga konstan tahun 1983 sebesar : 278.353,2 juta rupiah meningkat menjadi 386.695,9 juta rupiah pada tahun 1990. Pertumbuhan PDRB Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas dasar harga konstan 1983 rata-rata pertahun adalah 6,8 %. Sumbangan sektor kegiatan ekonomi terhadap PDRB yang dominan selama tahun 1990 adalah sektor :

- (1) Industri pengelolaan (14, 28%)
- (2) Bangunan ( 15,48%)
- (3) Perdagangan (18,38%)
- (4) Pemerintahan dan Hankam (19,95%)

PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 1983 antara tahun 1985 dan 1990 mengalami kenaikan yaitu dari Rp 559.274,53 menjadi Rp 746.138,40. Dalam kurun waktu 1985-1990 tersebut rata-rata kenaikan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar 5,63%.

###### **Pengeluaran Pembangunan**

Pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terus meningkat. Tahun 1987 pengeluaran pembangunan fisik sebesar Rp 2.264,3 juta meningkat menjadi Rp 10.865,2 juta rupiah selama tahun 1991. Perkembangan pengeluaran Pembangunan fisik selama kurun waktu 1987-1991 rata-rata pertahun adalah 22,29 %.

### **Ekspor non migas**

Resilisasi ekspor non migas terus mengalami kenaikan pada tahun 1985 besarnya ekspor non migas adalah US\$ 3,08 juta, menjadi US\$ 20,80 juta pada tahun 1990. Kenaikan ekspor rata-rata pertahun dalam kurun waktu 1985-1990 adalah 62,3 5. Tetapi kenaikan ekspor yang pesat ini juga diikuti oleh kenaikan impor yang cukup tinggi pula, tahun 1987 besarnya impor adalah US\$ 183,93 juta dan tahun 1990 sebesar US\$ 470,51 juta. Sehingga neraca perdagangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta selalu mengalami defisit.

### **Tingkat Inflasi**

Tingkat inflasi dalam kurun waktu 1985-1990 cenderung stabil dan dapat dikendalikan pada tingkat satu digit. Tahun 1985 tingkat inflasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah 7,6%, dan tahun 1990 sebesar 8,4 %, Rata-rata perubahan inflasi per tahun dalam kurun waktu 1985-1990 adalah 0,11%.

### **Produksi Pulsa**

Produksi pulsa telpon mengalami peningkatan yang pesat. Tahun 1987 produksi pulsa sebesar 73, juta meningkat menjadi 125,97 juta pada tahun 1991. Pada kurun waktu 1987-1991 pertumbuhan produksi pulsa 14,3% per tahun.

### **Penggunaan energi listrik**

Penggunaan energi listrik dari tahun ketahun juga meningkat. Tahun 1987 penggunaan listrik sebesar 149,8 juta kwh, menjadi 224,3 juta kwh pada tahun 1991. Pertumbuhan penggunaan listrik pertahun dalam kurun waktu 1987-1991 adalah 13,10%.

#### **b. Bidang kesejahteraan, Pendidikan dan Kebudayaan**

Pertumbuhan penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun 1991 adalah 519.997 orang laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 1985-1991 adalah 0,58% per tahun yang tergolong relatif rendah. Kepadatan penduduk di Surakarta adalah 11.807 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah kecamatan Jebres yaitu 9.660 orang per km<sup>2</sup>.

Seks ratio penduduk Surakarta tahun 1991 adalah 950 yang cenderung mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun 1985 yaitu 946.

### **Pekerjaan Penduduk**

Tahun 1991 penduduk surakarta yang berumur 10 tahun keatas yang sudah bekerja adalah 346.378 atau 66,6% dari jumlah penduduk, dengan demikian angka ketergantungan (dependency ratio) 474 per seribu sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh industri (21,85%), buruh bangunan (16,65%), sebagai pegawai negeri (7,1%).

### **Tingkat Kematian dan Kelahiran**

Dengan meningkatnya fasilitas kesehatan, maka angka kematian dapat ditekan. Tahun 1991 angka kematian kasar adalah 6,4 per seribu penduduk, angka kematian bayi 2,8 perseribu kelahiran.

Tahun 1985 angka kelahiran adalah 17 per 1000 penduduk menjadi 13 per 1000 penduduk tahun 1991. Penurunan angka kelahiran ini sebagai akibat keberhasilan program KB.

Umur harapan hidup penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta cenderung meningkat. Tahun 1985 umur harapan hidup adalah 64,8 tahun, tahun 1991 adalah 65,1 tahun.

### **Rasio Dokter dan Bidan**

Tahun 1991 jumlah dokter dan bidan di surakarta adalah 565 orang. Ratio penduduk/dokter dan bidan 920,3 artinya setiap seorang dokter dan bidan harus melayani 920 sampai 921 orang. Rasio ini bila dibandingkan keadaan tahun 1985 telah mengalami penurunan. Ratio penduduk/dokter dan bidan tahun 1985 adalah 1.799,8.

### **Perumahan Penduduk**

Tahun 1991 jumlah rumah penduduk di surakarta 84.062 buah dengan kondisi dinding batu 55,6 persen, dinding setengah batu 17,7 persen, berdinding kayu 8,2 persen dan berdinding bambu 18,5 persen. Bila dibanding dengan tahun 1985 jumlah perumahan penduduk mengalami kenaikan 2,5 persen. Yaitu dari 82.041 tahun 1985 menjadi 84.063 tahun 1991, dengan kondisi dinding yang berbeda. Tahun 1985 rumah penduduk yang berdinding batu 50,7 persen, berdinding setengah batu 15,1 persen, berdinding kayu 8,4 persen, berdinding bambu 25,8 persen.

### **Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas Pendidikan Dasar yang terdiri dari negeri dan swasta tahun 1991 yang berupa sebagai berikut :

Jumlah gedung negeri 307 dan swasta 104, jumlah sekolah negeri 260 dan swasta 94, jumlah guru negeri 2.602 orang swasta 591 orang, jumlah murid negeri 53.209 orang swasta 19.231 orang, sehingga jumlah keseluruhan murid negeri dan swasta 72.440 orang yang sedikit mengalami kenaikan dibanding jumlah murid tahun 1986 yaitu 72.179 orang. Tahun 1991 rasio murid/ gedung adalah 164,3 ratio murid/guru 22,69, tahun 1986 ratio murid/gedung 206,2 ratio murid/guru 22,1.

Fasilitas pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama yang terdiri dari negeri dan swasta tahun 1991 yang berupa sebagai berikut :

Jumlah gedung negeri 27 dan swasta 62, jumlah sekolah negeri 27 dan swasta 71, jumlah guru negeri 1164 orang swasta 1.322 orang, jumlah murid negeri 17.961 orang dan swasta 16.634 orang. Tahun 1991 ratio murid/gedung 388,68, ratio murid/guru 13,92, tahun 1987 ratio murid/gedung 524,69 dan ratio murid/guru 13,34.

Fasilitas pendidikan untuk tingkat SLTA yang terdiri dari negeri dan swasta tahun 1991 yang berupa sebagai berikut :

Jumlah gedung negeri 17 dan swasta 70, jumlah sekolah negeri 18 dan swasta 83, jumlah guru negeri 1.097 orang swasta 2.511 orang, jumlah murid negeri 13.952 orang swasta 28.782 orang, sedang ratio murid/gedung 491,2 ratio murid/guru 11,84.

### **Pariwisata Budaya**

Surakarta sebagai Kota pariwisata budaya memiliki karakteristik tersendiri melalui peningkatan keraton kasunanan dan Mangkunegaran. Karakteristik tersebut menyangkut seni bangunan dan tradisi budaya yang ditinggalkan yang selanjutnya ikut mewarnai sebagian dari perilaku masyarakat Surakarta. Kondisi ini menjadi daya tarik wisatawan manca negara untuk datang ke Surakarta.

Sebagai gambaran tentang perkembangan jumlah wisatawan yang datang di Surakarta tahun 1987 sebesar 2.257 orang naik menjadi 22.897 orang untuk tahun 1991. Umumnya mereka menginap di hotel-hotel berbintang dan hanya sebagian kecil yang menginap di hotel melati. Lama tinggal rata-rata 1 sampai 2 hari.

#### **c. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilindungi masyarakat kotamadya Daerah tingkat II Surakarta, dilihat dari sisi perkembangan lahiriah cukup menggembirakan. Hal ini secara kuantitatif dapat digambarkan dari besarnya minat beribadah yang disertai dengan pembangunan sarana peribadatan dimana dari tahun 1989-1991, untuk pembangunan Masjid naik rata-rata 5,13% pertahun, Gereja 5,02% per tahun

dan kuil/vihara 0% per tahun. Keadaan tersebut diikuti pula oleh kenaikan jumlah pemeluk agama pada masing-masing agama yaitu untuk agama islam naik 0,81% per tahun, Agama kristen katolik 0,11% per tahun dan agama Hindu naik 1,15% per tahun.

Sedangkan khusus bagi agama Budha dan kristen Protestan mengalami penurunan rata-rata masing-masing 4,17% dan 0,12% per tahun.

Selanjutnya dari sisi pembinaan dan pengamalan sebagian dari totalitas ajaran agama juga menunjukkan perkembangan yang menggairahkan dimana rata-rata angka nikah dan rujuk per tahun mencapai 6,29% dan 23,61% sedangkan peristiwa talak mengalami penurunan 5,50% per tahun. Kemudian secara kualitatif telah dirasakan bahwa secara bertahap lahir keinginan masyarakat surakarta untuk melaksanakan internalisasi nilai/ajaran agama dalam kehidupan dan aktivitas keseharian bagi para pemeluk agama untuk melaksanakan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa agama bukan sebagai obyek pengembangan melainkan agama sebagai subyek yang ikut menentukan proses pengambilan keputusan pemeluknya dalam pelaksanaan dan pengamalan pembangunan.

d. Bidang Ilmu Pengetahuan

Pengembangan bidang ilmu pengetahuan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal tingkat SLTP dan SLTA semakin meningkat seperti yang dikemukakan pada butir b. Sedangkan yang melalui pendidikan tinggi, universitas atau yang sederajat baik negeri maupun swasta berjumlah 8 buah, dan sejumlah program diploma yang ada di Surakarta.

e. Bidang hukum

Pembangunan di bidang hukum melalui pendidikan dan latihan pada aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan cepat dan benar. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemrosesan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Dari banyaknya perkara pelanggaran hukum yang masuk pengadilan dan telah mendapatkan keputusan pengadilan semakin meningkat, sebagai contoh pada tahun 1987 jumlah perkara sumir yang masuk pengadilan sebanyak 2.385, sedangkan pada tahun 1991 perkara sumir yang masuk pengadilan turun menjadi 431 dan sebanyak 54,5% dapat diputus pengadilan. Jumlah perkara yang masuk pengadilan yang semakin berkurang ini, dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa tingkat pelanggaran hukum di kotamadya Surakarta cenderung menurun.

Di kalangan anggota masyarakat kesadaran hukum ini cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat banyak anggota masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum melalui

kadarkum, memanfaatkan badan peradilan dan mengetahui fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sehingga banyak anggota masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada lembaga ini.

f. Bidang Politik, Aparat Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Pembangunan politik bagi masyarakat diutamakan pada politik kenegaraan untuk menjadikan anggota masyarakat memahami fungsinya sebagai warga negara yang baik, yang mengetahui hak dan kewajibannya secara konstitusional, demokratis. Penataran P4 dan penyuluhan hukum pada hakekatnya merupakan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga terbina kesatuan dan persatuan antar warga negara. Penataran P4 bukan saja diperuntukkan bagi aparat negara, tetapi juga diperuntukkan bagi anggota masyarakat, Pelajar dan mahasiswa.

Pada tahun 1987 telah ditatar P4 sebanyak 32.360 orang, sedangkan pada tahun 1991 jumlah orang yang berhasil ditatar P4 dengan berbagai pola telah mencapai 39.664 orang.

Jangkauan penerangan dan komunikasi semakin luas, yang menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang berbagai informal. Hal ini sangat dimungkinkan karena semakin banyaknya alat media elektronika maupun media cetak. Pada tahun 1987 penduduk yang memiliki radio baru sejumlah 26.735 dan pemilik TV baru baru 24.400 orang. Tahun 1991 penduduk yang memiliki radio sebanyak 35.373 dan yang memiliki TV sebanyak 38.987. Sepanjang kurun waktu 1987-1991 kenaikan rata-rata pemilik radio 7,6% sedangkan kenaikan pemilik TV rata-rata 13,8% per tahun.

Penduduk pelanggan telepon antara tahun 1987 dan 1991 juga meningkat. Tahun 1987 pelanggan telepon baru mencapai jumlah 6.718 yang terdiri pelanggan dinas dan masyarakat, dan tahun 1991 sebanyak 15.964 sambungan. Kenaikan rata-rata pelanggan telepon per tahun sebesar 26,65%.

g. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Bidang Pertahanan dan Keamanan di kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta semakin mantap. Hal ini dapat terlihat secara relatif tidak ada peristiwa yang tidak sara antara tahun 1985-1991. Dalam meningkatkan ketahanan wilayah selain ditujukan pada aparatur pemerintah, juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pertahanan sipil.

2. Potensi Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta

Sebagaimana uraian tersaji diatas bahwa kondisi dan potensi Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta yang terakumulasi dalam hasil pembangunan secara garis besar dan bersifat umum

telah tertuang dalam 7 bidang pembangunan. Sedangkan potensi yang sifatnya lebih khusus dan menjadi karakteristik utama daerah tingkat II Kotamadya Surakarta; antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Keadaan Geografis

Letak Geografis Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta antara  $110^{\circ} 45' 15''$  sampai  $110^{\circ} 45' 35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 56'$  Lintang selatan. Kotamadya Surakarta berada di dataran rendah yang dilalui sungai Pepe, Anyar dan Jenes yang kesemuanya bermuara di Bengawan Sala.

Dilihat dari atuan wilayah Pengembangan Kotamadya Tingkat II Surakarta merupakan daerah penghubung bagi daerah tingkat II di wilayah Pembangunan VIII. Pada segi lainnya, Kotamadya Surakarta berposisi menguntungkan karena terletak antara 3 propinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor dinamis yang mampu mengelola faktor yang lain untuk mencapai produktifitas pemakaian sumber daya yang optimal. Jumlah penduduk Kotamadya Surakarta tahun 1991 sebesar 519.997 jiwa yang tersebar di 5 wilayah Kecamatan merupakan modal yang sangat besar untuk kegiatan pembangunan.

c. Pusat Pertumbuhan Daerah

Surakarta sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Tengah disamping mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi diantara pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Tengah juga telah mampu mendorong pertumbuhan daerah di sekitarnya.

Di wilayah Pembangunan IV Kotamadya Surakarta memiliki pertumbuhan cukup tinggi yaitu 10,70% (berdasarkan harga konstan tahun 1983). Bila dilihat sebagai wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, Surakarta termasuk urutan ketiga sesudah Kabupaten Kudus (12,66%) dan Kabupaten Semarang (10,84%).

d. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Prasarana ekonomi yang berupa lembaga keuangan (bank) dengan jumlah memadai, pusat-pusat perbelanjaan, bursa perdagangan sandang (tekstil), merupakan kekuatan potensial yang dapat mempercepat pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta aspek industri dan perdagangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan kekuatan riil bagi pembangunan daerah. Dilihat dari tipologi industri di Surakarta cukup

potensial dalam industri kerajinan, demikian juga dalam perdagangan lebih memiliki sifat perdagangan berskala kecil.

e. Budaya, Pariwisata dan Olah raga

Surakarta dianggap sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan adanya keraton Kasunanan dan Puro Mangkunegaran dapat dikembangkan sebagai obyek wisata, industri kecil dengan beraneka produk dapat dikembangkan sebagai industri atau kerajinan barang cendera mata bagi wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan Manca negara. Tersedianya sarana Akomodasi wisata baik hotel berbintang maupun hotel melati yang dapat menunjang perkembangan wisatawan yang berkunjung ke Surakarta.

Potensi jalur penerbangan internasional, dengan dikembangkannya Bandara Adi Sumarmo menjadi bandara kelas Internasional. Dibiidang olah raga, Pekan Olah Raga Nasional (PON) pertama tahun 1948 di Kota Sala adalah fakta sejarah yang menggambarkan potret keberadaan dan dinamika masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Keadaan tersebut secara nyata terus diupayakan melalui berbagai kebijakan pengembangan dan peningkatan sarana-sarana dari pelita I hingga pelita V. Berkenaan dengan upaya pengembangan tersebut maka olahraga bagi masyarakat Kotamadya daerah tingkat II Surakarta menjadi bagian kehidupan yang merupakan kondisi dinamis dan potensi efektif pembangunan.

f. Lembaga Pendidikan Tinggi

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta merupakan kekuatan potensial yang dapat diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta percepatan pembangunan di surakarta.

g. Sub Wilayah Pembangunan (SWP)

Berkembangnya satuan wilayah pembangunan yang telah ditetapkan pada Pelita-pelita sebelumnya, merupakan kekuatan potensial yang dapat digunakan sebagai pendekatan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

h. Semangat Kebersamaan

Keberhasilan Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta meraih penghargaan Adipura 4 kali berturut-turut dan 3 kali Adipura Kencana, menunjukkan adanya semangat kebersamaan seluruh warga masyarakat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Pemerintah



dalam mengupayakan prestasi daerah yang mempunyai dampak positif baik pada tingkat pada tingkat regional maupun nasional. Potensi semangat kebersamaan ini merupakan model yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam membangun daerah.

## **B. MAKNA DAN HAKEKAT PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Makna pembangunan daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah pembangunan dari dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah, yang mencakup seluruh kehidupan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta merupakan perwujudan wawasan nusantara.

Hakekat pembangunan daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

## **C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Tujuan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah sebagai perwujudan dari tujuan Pembangunan Nasional dan tujuan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tetap mengusahakan terciptanya wilayah dan masyarakat yang berketahanan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih mandiri dengan keadilan dan kemakmuran yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk :

1. Memecahkan masalah-masalah yang mendesak terutama masalah-masalah yang belum secara tuntas dapat diselesaikan pada tahap pembangunan yang lalu.
2. Menunjang, menerapkan serta melengkapi pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ada di daerah.

## **D. ASAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Asas Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah suatu ketentuan dasar yang harus dipedomi, diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara serasi dan terpadu.

Asas-asas Pembangunan tersebut adalah :

1) Asas keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam asas ini jelas bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh kemauan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadikan dasar spiritual, moral dan etika dalam rangka pembangunan daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagai pengamalan Pancasila.

2) Asas Manfaat

Dalam asas ini jelas bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta khususnya dan Nasional pada umumnya, peningkatan kesejahteraan pengembangan pribadi masyarakat serta mengutamakan nilai-nilai luhur budaya dalam usaha melestarikan serta selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

3) Asas Demokrasi Pancasila

Dalam asas ini dijelaskan bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan daerah yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4) Asas Keadilan dan Merata

Dalam asas ini diharapkan bahwa pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang diselenggarakan sebagai usaha bersama yang harus merata pada semua lapisan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat.

5) Asas Keselamatan, Keresasian dan Keselarasan Dalam Perikehidupan

Dalam asas ini diharapkan bahwa pembangunan daerah harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian dan kesadaran antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual jiwa dan rasa individu masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta khususnya dan negara pada umumnya.

6) Asas Hukum

Dalam asas ini diharapkan bahwa Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, setiap warga negara dan penyelenggara pemerintahan harus taat pada hukum yang

berintikan kebenaran dan keadilan serta diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

#### 7) Asas Kemandirian

Dalam asas ini yang diharapkan bahwa Pembangunan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dapat meningkatkan PADS (Pendapatan Asli Daerah sendiri) setinggi mungkin dalam usaha mengurangi ketergantungan ke pusat yang bersendikan pada kemandirian daerah.

#### 8) Asas Kejuangan

Dalam asas ini yang diharapkan bahwa dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

#### 9) Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam asas ini diharapkan bahwa agar pembanguan daerah dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggara perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah, Penyelenggaraan Pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta mengacu pada strategi wawasan Identitas/Jatidiri Jawa Tengah, yang merupakan penjabaran dari wawasan nusantara, yang penerapannya dilakukan melalui :

1. Mengenali, menggali dan mendayagunakan segenap potensi yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untuk mengatasi berbagai masalah pokok pembangunan.
2. Memperhitungkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan kemampuan berbagai organisasi masyarakat dilingkungan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
3. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebaga bidang dan sektor.

Strategi wawasan identitas /jatidiri adalah strategi yang mendasarkan pada cara pandang yang mengarah kepada terwujudnya masyarakat dan wilayah yang berketahanan sebagai suatu kondisi dinamis yang mapu mengatasi segala hambatan, rintangan, gangguan, ancaman dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah baik langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan potensi-potensi baik potensi alamiah maupun sosial, serta berapresiasi pada pengertian yang tersirat dalam lambang daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan berbagai aspek yang terkandung didalamnya.

Penerapan wawasan identitas tersebut dipolakan kedalam landasan operasional program Sala BERSERI (bersih, Sehat, rapi, Indah) yakni program penataan dan pembangunan

KotamadyaSurakarta yang mengandung suatu pengertian yang memiliki unsur kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan.

Program sala BERSERI tersebut bermuara pada tujuan pembangunan Khas Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yaitu sala Kuncara, artinya Sala termasyur,mampu berbicara dan diperhitungkan, baik dalam forum Regional, nasional maupun Internasional lantaran prestasi kerja emas warga sala.

Guna mempercepat pencpaian Sala Kuncara tersebut adalah dengan memprioritaskan program TRI KRIDA UTAMA, sebagai sarana atau tujuan antara pembangunan yang memprioritaskan Kota Sala sebagai Kota Budaya, Pariwisata dan Kota Olah Raga.

#### E. MATRA RUANG PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Rencana tata ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah serangkaian upaya pemanfaatan ruang daerah secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan.Tata ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta juga menjadi bagian integral dan terstruktur dari Perencanaan tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan sekaligus merupakan penjabaran Tata Ruang Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya sebagai mata ruang pembangunan daerah dalam implementasi kebijakan umum pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, kedua aspek perlindungan seperti tersaji di atas akan mengilhami dan mewarnai kebijakan operasional mengenai pilar kegiatan sub wilayah pembangunan (WSP) yang mengarah pada pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, serta mengarah pada kelangsungan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagai kota BERSERI. Kebijakan lain yang perlu dikemukakan adalah operasionalisasi pembangunan internal dalam sub wilayah pembangunanyang selain mengarah pada pencapaian sasaran yang ditentukan juga perlu terlihat keterpaduannya dalam pembangunan lintas sektoral sehingga dapat mewujudkan jatidiri daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sesuai dengan program TRI KRIDA UTAMA yaitu : surakarta sebagai kota budaya, Pariwisata dan Olah raga yang perlu dikembangkan sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri dan Perdagangan.

BAB III  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA KOTAMDYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

A. UMUM

1. Pelaksanaan Pelita I sampai dengan Pelita V di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dicapai oleh pembangunan nasional maupun pembangunan daerah propinsi daerah tingkat I Jawa Tengah, dimana dalam periode tersebut telah dapat diletakkan landasan yang cukup kuat untuk memasuki periode tinggal landas. Keberhasilan pembangunan tersebut berkat peran serta masyarakat, meningkatnya kemampuan aparat dan mantapnya kepemimpinan di daerah, serta didukung oleh stabilitas nasional dan daerah dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya pertahanan dan keamanan daerah, dalam kerangka Stabilitas Nasional.
  - a. Hasil pembangunan bidang ekonomi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta antara lain kemampuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat melampaui target pertumbuhan ekonomi yang telah ditentukan, meningkatnya produksi sektor-sektor kegiatan ekonomi terutama sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor pemerintahan, meningkatnya PDRB perkapita yang mencerminkan kenaikan pendapatan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, meningkatnya ekspor non migas, meningkatnya kemampuan Pemerintah daerah membiayai proyek-proyek pembangunan, terkendalinya tingkat inflasi.
  - b. Hasil-hasil pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan dan Kebudayaan antara lain meningkatnya umur harapan hidup penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, menurunnya angka kematian kasar maupun angka kematian bayi, menurunnya angka kelahiran sebagai akibat keberhasilan KB, menurunnya rasio penduduk per dokter dan bidan, meningkatnya fasilitas kesehatan yang lainnya. Dibidang pendidikan telah berhasil diturunkan rasio murid/guru untuk pendidikan SD, SLTP dan SLTA yang berarti telah dapat dicukupi jumlah guru terutama guru SD, menurunnya rasio murid/ gedung yang berarti lebih banyak gedung sekolah yang tersedia. Pengembangan kebudayaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sangat strategis dengan adanya keraton kasunanan dan Pura Mangkunegaran serta semakin semaraknya kesenian tradisional.
  - c. Hasil pembangunan di Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain semakin meningkatnya pemeluk agama baik agama Islam, Kristen, katolik, Hindu, dan Budha serta meningkatnya sarana peribadatan ibadah masjid.

- d. Hasil pembangunan di bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi antara lain telah dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan perguruan tinggi dan berbagai lembaga swasta yang merupakan bukti semakin meningkatnya upaya pengembangan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - e. Hasil Pembangunan di Bidang Hukum antara lain berwujud meningkatnya kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, semakin cepat penyelesaian perkara pelanggaran hukum. Disamping itu kesadaran hukum dikalangan masyarakat semakin meningkat, tumbuhnya organisasi pencipta hukum seperti misalnya Kadarum, penyuluhan hukum oleh aparatur hukum sehingga menambah pengetahuan tentang hukum bagi masyarakat luas.
  - f. Hasil pembangunan di bidang politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan media massa antara lain telah meningkatnya kesadaran politik, terutama politik kenegaraan dengan semakin banyaknya masyarakat maupun aparat pemerintah yang telah mendapat penataran P4. Meningkatnya sarananya penerangan dan komunikasi serta perkembangan media massa, bertambahnya pemilik radio dan TV.
  - g. Hasil Pembangunan dibidang Pertahanan dan keamanan meningkat berkat peran aktif dari masyarakat dalam bentuk pertahanan sipil hingga ketingkat kelurahan-kelurahan. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya yang merupakan dukungan dalam menciptakan stabilitas keamanan.
2. Berdasarkan kondisi dan potensi di Kotamadya daerah Tingkat Ii Surakarta, selama pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Pertama, di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terdapat 5 masalah pokok yang belum terselesaikan secara tuntas pada Pembangunan Lima Tahun Ke V Daerah Yaitu :
- a. Masalah Kependudukan  
Masalah kependudukan ini antara lain masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, secara relatif pertumbuhan penduduk masih tinggi serta profesionalisme tenaga kerja yang masih rendah.
  - b. Masalah keseimbangan Lingkungan dan Pelestarian Alam  
Masalah keseimbangan Lingkungan dan Pelestarian Alam pada dasarnya meliputi : Aspek pertama penataan ruang yang menyangkut alokasi sumberdaya ekonomi, penataan seni dan fisik bangunan, tata guna tanah dan konservasi air. Aspek kedua menyangkut pencemaran lingkungan yang ditimbulkan baik oleh kegiatan produksi dan konsumsi yang masih perlu mendapatkan perhatian.
  - c. Masalah Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Masalah Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disamping berkaitan dengan kebijaksanaan nasional yang menyangkut masalah sistem, sarana dan prasarana serta penggalan sumber daya untuk pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembangunan di daerah.

d. Masalah Sub Wilayah Pembangunan

Masalah yang berkaitan dengan masalah satuan wilayah pembangunan yang belum serasi dan diperlukan pemanfaatan ruang yang tepat sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing satuan Wilayah Pembangunan.

e. Aparatur Pemerintah daerah

Aparatur Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang masih perlu ditingkatkan profesionalisme dan produktifitas serta etos kerjanya.

3. Isu Pokok dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

a. Kependudukan terutama dengan bertambahnya penduduk usia kerja yang memerlukan kebijaksanaan perluasan kerja, meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut yang memerlukan kebijaksanaan pelayanan sosial yang lebih baik.

b. Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan pengelolaannya dan perlu ditangani dengan perencanaan tata ruang yang seimbang yang memperhatikan sumber daya dan potensi alam setempat.

c. Kurang meratanya pembangunan pada sub-sub Wilayah Pembangunan, sehingga menimbulkan ketidak merataan dalam pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan sosial. Masalah ketidakmerataan ini perlu diatasi, antara lain melalui usaha pengentasan kemiskinan terutama di daerah-daerah kumuh.

## B. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah :

1. Untuk menciptakan manusia dan masyarakat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang merupakan bagian integral bangsa Indonesia, menjadi manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tahap selanjutnya.

3. Membina hubungan dengan daerah Tingkat II terutama Daerah keselarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam rangka mengisi pembangunan nasional guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### C. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

#### SASARAN UMUM

Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin, dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin, dalam suasana kehidupan yang berkeeseimbangan, serasi dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan sasaran umum tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran bidang :

##### a. Bidang Ekonomi

Terciptanya perekonomian Daerah yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama dengan berasaskan kekeluargaan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang mantap dan dinamis, bercirikan industri dari perdagangan yang kuat dan maju yang didukung oleh sektor-sektor lainnya yang tangguh disertai sistem distribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang kokoh antara koperasi, swasta dan BUMN.

Mendayagunakan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi secara optimal yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, maju produkti, kreatif dan profesional.

Penciptaan iklim usaha yang sehat serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

##### b. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

Terwujudnya kehidupan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang semakin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata.

Terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata, yang mampu mewujudkan budipekerti masyarakat yang luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik berdisiplin, kreatif produktif dan profesional.



Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin pada meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan memperkuat jati diri kepribadian bangsa.

c. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Terciptanya suasana kehidupab beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa, yang secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Terciptanya kemampuan daerah dalam pemanfaatan, pengembangan serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan peradaban serta ketangguhan dan daya saing bangsa yang diperlukan untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan yang berwawasan lingkungan untuk menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral dan etik yang berdasarkan nilai dan budaya yang luhur serta nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

e. Bidang Hukum

Terciptanya pelaksanaan hukum nasionla di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakkan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan nasional, yang didukung aparat hukum sarana dan prasarana yang memadai. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

f. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Tercipta dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitusional berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mantap dan dinamis dengan kualitas manusia dan masyarakat yang ada di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang memiliki kecerdasan dan etika politik serta perilaku sesuai dengan nilai luhur pancasila.

Terciptanya aparaturnya pemerintah daerah yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat bangsa dan negara khususnya tugas-tugas pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang dilandasi oleh semangat pengabdian dan profesionalisme kerja.

Terciptanya penerangan yang informatif mengenai program-program pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi dialogis antara pemerintah daerah dan masyarakat yang didukung oleh kebersamaan dan keterbukaan informasi media massa yang memadai.

g. Bidang Pertahanan Keamanan

Terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan daerah dalam kerangka pertahanan nasional dengan daya tangkal yang tangguh berdasarkan sistem pertahanan rakyat semesta, yang tercermin dari kemampuan negara yang ada di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Kesadaran masyarakat untuk bela negara yang tinggi, pelaksanaan Dwi fungsi ABRI dan kemanunggalan ABRI-Rakyat yang semakin mantap dan dinamis, yang didukung sarana dan prasarana yang andal sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap.

D. TITIK BERAT PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Titik berat pembangunan Jangka panjang Kedua daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diletakkan pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh bidang-bidang yang lain sejalan dengan kemajuan bidang ekonomi yang saling memperkuat untuk mencapai terwujudnya tujuan pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan tujuan pembangunan nasional.

E. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Pembangunan Jangka Panjang Kedua daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan terus membangkitkan dan memelihara rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian dan tekad untuk membangun masa depan bangsa sehingga berkembang menjadi sikap mental dan sikap hidup yang mampu mendorong percepatan proses-proses pembangunan di segala bidang.

Arah pembangunan jangka panjang kedua daerah adalah :

1. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Ke II daerah  
Pelaksanaan Pembangunan jangka panjang ke II daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan : Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas daerah dalam kaitannya dengan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
3. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan produktivitas daerah, pembagian pendapatan yang merata, mempersempit disparitas sosial ekonomi masyarakat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
4. Pembangunan ekonomi pada PJP II di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, diarahkan pada terwujudnya perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang andal dan mandiri yang merupakan satu kesatuan dari perekonomian nasional dan tetap berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
5. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merupakan kerja sama atas dasar kemitraan usaha antara swasta, koperasi dan BUMD.
6. Dalam Pembangunan Ekonomi Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sektor industri, perdagangan, bangunan, jasa keuangan, yang merupakan sektor potensial dalam memberikan sumbangan yang besar terhadap PDRB dikembangkan secara bersama dengan sektor yang lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didistribusikan secara adil dan merata.
7. Pengembangan Industri kecil, kerajinan, industri rumah tangga yang jumlahnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta cukup besar perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mengupayakan pemerataan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
8. Koperasi yang diharapkan sebagai sokoguru perekonomian daerah, maupun perekonomian nasional dan koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam upaya untuk mencapai pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9. Pembangunan sumber daya manusia di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan laju pertumbuhan dikendalikan oleh transmigrasi dan keluarga berencana.

10. Pembangunan pendidikan di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pemberian dorongan dan penciptaan forum pengembangan pendidikan dan berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan pembangunan. Dalam hubungan dengan pemerataan kesempatan pendidikan pemerintah daerah bersama pihak swasta perlu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai skala prioritas pengembangan program pendidikan.
11. Pembangunan budaya daerah khususnya budaya jawa diarahkan untuk dapat memberi jiwa kepribadian bagi perilaku masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu juga dimaksudkan untuk mempertegas jatidiri daerah dalam hubungannya dengan hadirnya berbagai jenis budaya asing, sehingga dengan ketegasan kesejatan identitas tersebut mampu menyaring budaya asing, yang kurang relevan dan sejalan dengan program pembangunan. Disamping itu pembangunan budaya daerah khususnya budaya jawa adalah untuk memupuk rasa kebersamaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
12. Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan agar pemanfaatan, pengembangan dan penguasaannya dapat mempercepat proses peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, perluasan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
13. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sehingga tercipta suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan, dengan didukung tersedianya sarana dan prasarana kehidupan beragama yang cukup memadai.
14. Pembangunan hukum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk menghasilkan produk-produk hukum yang mampu mengatur tugas-tugas aparat dan penyelenggaraan pembangunan, penyusunan dan perencanaannya harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional. Disamping itu pembangunan hukum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan semakin meningkatkan kesadaran hukum, sehingga dicapai suatu suasana kehidupan yang tertib hukum. Pelaksanaan hukum perlu didukung

oleh aparat hukum yang bersih, berwibawa dan penuh pengabdian dan mempunyai rasa keadilan, profesional, efektif dan efisien.

15. Pemerintah daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparat Pemerintah daerah mereka memiliki sikap penuh pengabdian, jujur, tanggungjawab, disiplin, adil, dan berwibawa, sehingga mampu memberikan pelayanan dan pengayoman pada masyarakat di kotamadya Surakarta. Untuk itu diperlukan profesionalisme, budaya yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja bagi aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
16. Pembangunan politik di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan politik berdasarkan demokrasi Pancasila, mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan memantapkan proses komunikasi politik, pengembangan suasana dan sikap keterbukaan yang bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan kualitas pendidikan politik, kaderisasi dan keteladanan politik oleh masyarakat diperlukan informasi-informasi politik melalui penerangan komunikasi dan media massa yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka untuk menggerakkan peran aktif masyarakat dalam melakukan pembangunan.
17. Pembangunan ketahanan dan keamanan negara diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam konteks pertahanan dan keamanan negara secara nasional, dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang didukung oleh profesionalisme yang dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi, kemanunggalan ABRI oleh rakyat agar terjamin stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis yang dapat menjamin kelangsungan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Republik Indonesia.
18. Penataan ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian, pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, melalui pola pemanfaatan ruang secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras dan berkelanjutan. Pengaturan tata ruang tersebut diarahkan pada upaya tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas melalui distribusi spatial sumber daya yang mampu menjamin efisiensi pemanfaatan dan pelestarian fungsi sumber daya tersebut yang secara keseluruhan akan menjamin upaya peningkatan kemakmuran masyarakat.

## BAB IV PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

### A. UMUM

Pada akhirnya Pembangunan jangka Panjang Pertama, Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah berhasil menciptakan kerangka landasan yang cukup mantab sebagai titik tolak upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua daerah sehingga dalam Pelita VI Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dapat memasuki proses tinggal landas.

Hasil pembangunan tersebut telah dapat dirasakan oleh masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dengan meningkatnya taraf hidup mereka, serta terpecahnya masalah-masalah pokok yang mendesak, dengan tetap memperhatikan kondisi serta potensi yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan tersebut juga dilandasi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahunan Daerah sebelumnya.

Hasil pembangunan yang telah dicapai sebagai pemacu bagi masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untuk melanjutkan usaha-usaha pembangunan pada Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pola umum pembangunan lima tahun Keenam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan landasan pelaksanaan pembangunan daerah yang diawali pada tanggal 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1999. Pembangunan Lima Tahun Keenam merupakan tindak lanjut dari usaha-usaha pembaharuan yang telah dilakukan sebelumnya, dan meningkatkan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk dapat mewujudkan landasan yang kokoh dalam memasuki tahap awal era Pembangunan jangka Panjang Kedua, dengan mewujudkan masyarakat yang lebih meningkat kesejahteraannya baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Disamping itu pembangunan lima tahun keenam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diusahakan untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia mengentaskan kemiskinan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas daerah yang sehat dan dinamis dalam kerangka stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sekalipun Pembangunan Lima Tahun Kelima daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih ada masalah-masalah pokok yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan pada Pembangunan Lima Tahun Keenam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

#### Masalah-Masalah Pokok

Mengacu pada masalah-masalah pokok dan isu pokok serta kendala-kendala pada pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka masalah-masalah pokok yang belum terselesaikan dalam Pelita Kelima dan masih akan dihadapi pada Pelita Keenam adalah:

##### a. Masalah Kependudukan

Masalah kependudukan ini antara lain meliputi :

- (1) Kepadatan penduduk yang relatif masih tinggi dengan penyebaran secara proporsional kurang merata.
- (2) Kualitas penduduk sebagai sumberdaya manusia yang masih rendah perlu ditingkatkan, terutama penduduk yang tergolong angkatan kerja di mana 57 persen dari jumlah penduduk yang bekerja tidak sekolah dan paling tinggi berpendidikan sekolah dasar.
- (3) Jumlah penduduk miskin yang perlu ditanggulangi, selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (4) Pertumbuhan kesempatan kerja yang belum seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga diperlukan kebijaksanaan untuk memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi ketimpangan tersebut.
- (5) Dengan meningkatnya penduduk lanjut usia diperlukan layanan sosial bagi kelompok penduduk golongan ini yang perlu ditingkatkan.
- (6) Pelayanan sosial bagi penduduk penyandang masalah sosial terutama bagi penduduk penyandang cacat.
- (7) Disiplin penduduk yang perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang disiplin Nasional.

##### b. Masalah Keseimbangan Lingkungan dan Pelestarian Alam

Masalah keseimbangan lingkungan dan pelestarian alam yang meliputi antara lain :

- (1) Pengendalian pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan produksi dan konsumsi misalnya limbah sampah.

- (2) Masih perlu ditingkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan pencemaran lingkungan oleh masyarakat baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.
- (3) Berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya air tanah.
- (4) Masih adanya daerah rawan banjir dan daerah kumuh yang perlu ditanggulangi.
- (5) Belum dimanfaatkan secara optimal ruang daerah sesuai dengan kondisi dan potensinya. Masih diperlukan peningkatan penataan ruang dan tata guna tanah yang serasi dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang efisien di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (6) Pemeliharaan dan perlindungan serta pelestarian lingkungan yang mengandung nilai sejarah.
- (7) Pembangunan obyek wisata, sarana dan prasarana yang menunjang dunia kepariwisataan, termasuk pelestarian budaya daerah.
- (8) Pengadaan tanah untuk proyek pembangunan.
- (9) Penataan transportasi yang masih perlu ditingkatkan.

c. Masalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Masalah yang berkaitan dengan pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan teknologi antara lain :

- (1) Di samping berkait dengan kebijaksanaan nasional juga menyangkut keterbatasan sarana dan prasarana di daerah, masih diperlukan perumusan kebijaksanaan pembangunan pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang serasi dengan kepentingan dan potensi daerah.
- (2) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang dapat menampung pertumbuhan minat belajar kesekolah lanjutan pertama keatas.
- (3) Ketidak sesuaian antara tenaga terdidik dan terlatih dengan permintaan keahlian yang diminta.
- (4) Terjadinya kesenjangan antara banyaknya minat masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan ditingkat SLTP sampai SLTA dengan fasilitas yang tersedia di Perguruan Tinggi.
- (5) Kesulitan untuk melakukan pengendalian kebijaksanaan pendidikan, mengingat pendidikan di daerah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

d. Kesenjangan antar Sub Wilayah Pembangunan

Masalah yang berkaitan dengan (SWP) ini meliputi :

- (1) Keterkaitan antara penentuan Sub Wilayah Pembangunan dengan kebijaksanaan tata ruang di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.



- (2) Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah Sub Wilayah Pembangunan.
- (3) Pemandangan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan diperlukan motivasi dan persuasi serta pendanaan yang cukup besar.

e. Aparatur Pemerintah Daerah

Masalah yang berkaitan dengan aparaturnya Pemerintah Daerah antara lain :

- (1) kualitas sumber daya aparaturnya pemerintah daerah yang masih perlu ditingkatkan dalam menanggapi tuntutan pembangunan dan profesionalisme serta etos kerja yang tinggi.
- (2) Penataan organisasi, ketatalaksanaan dan sistem informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang belum efektif dan efisien.
- (3) Kondisi sarana dan prasarana yang belum memenuhi kebutuhan.

Isu pokok dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan lima tahun keenam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dengan kendala-kendala kesenjangan pendapatan, pertumbuhan antar sub wilayah Pembangunan dan terbatasnya peluang berusaha bagi golongan ekonomi lemah.
- b. Pertumbuhan angkatan kerja yang melebihi pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diciptakan serta kualitas angkatan kerja yang masih rendah.
- c. Kelestarian lingkungan, dengan terbatasnya sumberdaya alam dan eksploitasinya yang melebihi batas alamiah serta kendala masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.

## B. TUJUAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Sebagai tahap awal dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah, maka tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta searah dengan tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Nasional maupun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya baik lahir maupun batin yang lebih selaras, adil dan merata, dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta penataan ruang yang serasi dan dinamis.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan berikutnya.

## C. SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM

### UMUM

Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran umum pembangunan lima keenam daerah adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia, masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktifitas rakyat dalam meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin.

#### **Sasaran Bidang Pembangunan**

##### 1. Bidang Ekonomi

Penataan dan pemantapan industri yang megarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan dan perluasan serta penyebaran industri di daerah yang mempunyai potensi industri, meningkatkan keterkaitan industri besar dengan industri menengah, industri kecil dan kerajinan, meningkatkan keterkaitan sektor industri dengan sektor yang lain termasuk jasa.

Penataan dan pengembangan perdagangan barang dan jasa yang merupakan sektor dominan dalam memberi sumbangan terhadap PDRB Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Perluasan pasar luar negeri dengan perdagangan dan sistem distribusi semakin luas dan mantap.

Penataan dan pengembangan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien dan berperan dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat, yang secara keseluruhan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan meliputi peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan berusaha, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

##### 2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan kebudayaan

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan umum yang semakin adil dan merata yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, penyediaan pangan, sandang, papan yang memadai, memperluas kesempatan kerja untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan adil.

Peningkatan pelayanan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pemantapan sistem pendidikan sosial di daerah, untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai manusia beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri mempunyai rasa bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

Bidang pendidikan diutamakan peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan dasar dan perluasan pendidikan keahlian dan kejujuran. Peningkatan penghayatan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.

3. Bidang agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin pada makin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan melalui pendidikan di Lingkungan keluarga, di masyarakat dan di sekolah bersamaan dengan perluasan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunaikan ibadah masing-masing umat.

4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi

Peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang di dukung oleh pengembangan kemampuan sumber daya manusia sarana dan prasarana penelitian yang memadai.

Menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk melakukan penelitian menuju kearah pengembangan dan penerapan teknologi yang dapat mendukung pendalaman dan perluasan industri dalam rangka proses industrialisasi di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

5. Bidang Hukum

Menunjang penataan hukum nasional di daerah dengan meletakkan pola pikir yang sadar akan hukum bagi anggota masyarakat dan aparatur pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, menerapkan sistem hukum nasional di daerah serta menginventarisasi unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum di daerah, menegakkan disiplin hukum pada anggota masyarakat dan aparatur pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

6. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa

Penataan kehidupan Politik yang didukung oleh suasana yang memungkinkan berkembangnya budaya politik yang mengarah pada perwujudan sikap ketrbukaan yang bertanggungjawab dalam komunikasi antar dan antara supra struktur dan infrastruktur politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dinamis dan serasi.

Meningkatkan kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan dan menunjang kepentingan antar daerah.

Penataan manajemen aparatur pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan manusianya.

Meningkatkan kemampuan dan kegiatan penerangan, komunikasi dan media massa dalam menggerakkan dan menggairahkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

#### 7. Bidang Pertahan dan Keamanan

Penataan kemampuan segenap komponen ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimuali dari penataan perangkat dan perwujudan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan semakin mantapnya kemanunggalan ABRI dan rakyat, serta makin meningkatnya keterpaduan pembinaan dan penyaipan komponen pendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pengamanan pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPR tahun 1993 dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis, subversi, golongan ekstrim serta gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

### D. PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Memahami tujuan dan sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang kedua daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka prioritas Pembangunan lima tahun Keenam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diletakkan pada bidang ekonomi.

Sedangkan bidang-bidang yang lain dikembangkan sesuai dengan kemajuan bidang ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian prioritas pembangunan tersebut meliputi :

1. Penataan industri, perdagangan, jasa dan peningkatan keterkaitan antara antara sektor industri, perdagangan dan jasa dengan sektor-sektor yang lain mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri, perluasan jenis perdagangan dan usaha jasa yang didukung oleh kemampuan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Pemanfaatan sistem dan kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan dan sistem distribusi.

Pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor-faktor produksi dan sumber-sumber ekonomi yang lain, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

2. Pembangunan sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitasnya sehingga dapat mendukung ekonomi melalui pendidikan, pelatihan, perluasan pendidikan keahlian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatannya dalam pembangunan secara adil dan merata.
3. Pembangunan bidang-bidang yang lain terus ditingkatkan selaras dan serasi serta saling memperkuat dengan pembangunan bidang ekonomi, sehingga keseluruhan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan kesatuan gerak dalam perwujudan masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera lahir dan batin.
4. Amanat pembangunan bidang-bidang yang lain terus ditingkatkan, dengan memperhatikan daerah dalam sub wilayah pembangunan yang relatif tertinggal, sehingga memungkinkan terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah dalam suatu daerah dan secara bertahap mengurangi/mengentaskan kemiskinan masyarakat.

#### E. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Nasional dan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah sebagai berikut :

##### UMUM

1. Melanjutkan kebijaksanaan pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta selama Pelita Kelima daerah, sehingga terjalin kesinambungan program pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.  
Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas kehidupan masyarakat agar semakin maju dan mandiri yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.
2. Pelaksanaan Pembangunan Lima tahun Keenam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta bertumpu pada Tri logi Pembangunan yaitu :
  - a. Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
  - b. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi
  - c. Stabilitas daerah dalam kerangka stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

3. Pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta selain bertumpu pada kondisi sebagai kekuatan yang berdayaguna, perlu pula memperhatikan perubahan dunia, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Perkembangan dunia yang menimbulkan kendala bagi pembangunan daerah, perlu diantisipasi serta diambil langkah-langkah penanganannya secara dini, sedangkan yang mengandung peluang perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Pembangunan daerah yang semakin luas, penuh tantangan serta kompleks, memerlukan peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dalam manajemen pembangunan daerah yang terpadu dilandasi disiplin tanggung jawab dan semangat pembangunan.
5. Penjabaran Matra ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam perencanaan tata ruang daerah perlu disusun secara runtut dan ditetapkan dalam suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. Selajan dengan hal tersebut perlu adanya pembinaan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Daerah Tingkat II Surakarta untuk mengembangkan ketentuan-ketentuan operasional pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang memacu kepada perlindungan budidaya dan perlindungan non budidaya antara lain perlindungan cagar budaya.
6. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang-barang seperti industri batik yang dibutuhkan masyarakat terus ditingkatkan, diusahakan untuk menghasilkan produk unggulan yang mampu menerobos pasar internasional. Sejak dengan hal tersebut diperlukan pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil yang mampu melaksanakan berbagai jenis alih teknologi, termasuk mampu memilih teknologi tepat guna serta menerapkan, menguasai dan mengembangkannya sebagai hasil teknologi sendiri yang serasi dengan perkembangan budaya masyarakat agar lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat.
7. Pembangunan industri diarahkan pada penguatan dan pendalaman struktur industri untuk terus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri menuju kemandirian yang dapat menghasilkan barang-banrang yang semakin bermutu yang dikaitkan dengan pembangunan pembangunan disektor lain.

Sejalan dengan hal tersebut perlu terus ditingkatkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa industri dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk dapat menghasilkan produk unggulan.

Bersamaan dengan hal diatas perlu dikembangkan kemampuan sumber daya manusia baik untuk perencanaan, pelaksanaan dan penguasaan teknologi maupun tumbuhnya profesionalisme dan kewiraswastaan.

8. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan, terutama melalui pemerataan pembangunan industri dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut harus didukung oleh keterpaduan kebijaksanaan investasi, fiskal dan moneter pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, penerapan teknologi, pengembangan serta pemanfaatan pusat informasi pasar luar negeri dan dalam negeri. Kebijakan pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga negara, serta terarah pada terwujudnya tenaga kerja terampil dan tangguh.

Diupayakan adanya kesempatan yang terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian yang di dukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan, serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Dalam situasi dunia yang selalu berubah dengan cepat baik politik, ekonomi, teknologi, sosial budaya dan berbagai aspek lainnya, perlu ditingkatkan iklim sejuk dalam dunia, usaha terutama yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan sehingga tidak berkembang menjadi keresahan sosial. Untuk maksud tersebut perlu memantapkan hubungan industrial Pancasila serta terpenuhinya syarat dan norma kerja.

9. Pembanguna perdagangan diarahkan pada perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap yang mampu meningkatkan kemitraan usaha secara kokoh antara badan usaha koperasi, BUMD, dan swasta serta mampu menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi yang dapat mendukung upaya pemerataan dan memperkuat daya saing. Hal yang demikian ini harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan untuk memperkirakan dan kemampuan untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi dunia.

Disamping itu perlu dipahami bahwa pembangunan perdagangan adalah menyangkut kebutuhan dan selera konsumen. Atas dasar itu hak-hak konsumen dalam kaitannya dengan kualitas barang dagangan perlu dilindungi.

10. Pengembangan sistem transportasi diarahkan pada peningkatan peranan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik serta pertahanan. Usaha tersebut antara lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta penyempurnaan pengaturan yang harus selalu didasarkan pada kepentingan daerah, regional dan nasional.

11. Pembangunan Pos dan telekomunikasi terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar lebih mampu mendukung kegiatan pembangunan yang makin meluas dengan meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaannya serta memperluas jangkauan pelayanan ke seluruh daerah, interregional dan internasional.
12. Pembangunan kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperbesar penerimaan devisa, pendapatan daerah, memperluas dan meratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan daerah dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, memupuk cinta tanah air, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan pemasaran produk daerah.
13. Pembangunan energi diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi yang semakin meningkat, baik bagi kehidupan masyarakat maupun bagi kegiatan ekonomi terutama untuk mendukung proses industrialisasi yang menuju kemandirian dalam negeri.
14. Pembangunan transmigrasi makin didorong pada transmigrasi swakarsa, sehubungan dengan itu, perlu makin ditingkatkan upaya penyuluhan, penerangan dan pelayanan dengan mengikutkan pihak swasta. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan transmigrasi perlu dimantapkan koordinasi dan keterpaduan, baik antar sektor dan antar daerah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan.
15. Pembangunan usaha daerah dalam kerangka usaha nasional yang terdiri dari atas koperasi, usaha negara (BUMN) dan usaha swasta, yang mampu menjadim kekuatan ekonomi daerah yang semakin tangguh, diarahkan agar mampu meningkatkan tata hubungan dan kerja sama serta kemitraan usaha antara berbagai unsur ekonomi daerah, terutama antara pengusaha kuat dan lemah dalam suasana saling membantu dan saling menguntungkan sebagai perwujudan kesatuan kekuatan ekonomi daerah dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan demokrasi ekonomi pancasila.
16. Pembangunan koperasi diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
17. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu upaya tercapainya keadilan sosial yang merata diarahkan untuk menciptakan suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, untuk mewujudkan tata kehidupan sosial yang seimbang materuil maupun spirituil yang meliputi rasa keamanan,



kesusilaan, keselamatan, ketertiban dan ketentraman lahir batin serta memiliki harga diri dan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam pembangunan dan mencapai taraf hidup yang sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

18. Pembangunan kesejahteraan rakyat ditujukan agar tercipta sistem nilai dan sikap sosial yang mendukung usaha-usaha pembangunan sehingga terwujud kualitas hidup, kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup sosial dalam masyarakat yang menunjang pembangunan sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan taraf kehidupan sosial keluarga dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan rakyat diarahkan untuk meningkatkan usaha-usaha pengentasan penyandang masalah sosial melalui upaya-upaya : pelayanan, rehabilitasi dan bantuan sosial dalam rangka menunjang penanggulangan kemiskinan.

Peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan rakyat terus ditingkatkan dengan terus menggali dan menggalakkan potensi perorangan maupun organisasi.

19. Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan harus terpenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya, pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, tuntutan jama sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan jaman terhadap pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan perlu didorong dan ditingkatkan.

20. Kebudayaan daerah di Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta, yang merupakan perwujudan cipta, rasa karsa dan karya masyarakat sebagai salah satu identitas daerah diusahakan penggalan, pelestarian, pemeliharaan, pemupukan dan penyelamatannya.

Pembangunan kebudayaan daerah ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebanggaan serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya.

21. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi kualitas sumber daya manusia, kulaitas kehidupan dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup manusia, mendorong meningkatnya peran serta masyakat termasuk lembaga swadaya masyarakat sehingga masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.
22. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan secara terpadu untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai agama, moral, etik dan sosial budaya.
23. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Untuk itu perlu terus dikembangkan iklim kemasyarakatan yang mendukung bagi terwujudnya peningkatan sumber daya manusia melalui upaya pembangunan diberbagai bidang dan sektor.  
Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, penciptaan keserasian antara generasi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Penduduk usia lanjut yang memiliki pengalaman luas dan kearifan perlu diberikan perhatian untuk tetap berperan dalam pembangunan.
24. Pembinaan dan pengembangan anak dan remaja diupayakan melalui pembangunan diberbagai bidang dan sektor serta didukung oleh iklim yang menunjang terwujudnya masyarakat belajar. Pembinaan dan pengembangan anak dan remaja harus dimulai sedini mungkin dan perlu terus ditekankan pada kedudukan dan fungsi mereka sebagai tunas bangsa dan penerus cita-cita bangsa. Pembinaan dan pengembangan pemuda diarahkan pada upaya persiapan generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dan ulet dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa diarahkan mampu mewujudkan cita-cita nasional serta mampu berperan sebagai insan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikiran maju, beridealisme tinggi, patriotik, berkepribadian, mandiri dan berwawasan masa depan.
25. Pembinaan wanita diarahkan untuk menciptakan serta mengembangkan secara terus menerus iklim sosial yang mendukung agar wanita dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui peningkatan

pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat kaum wanita.

26. Pembangunan perumahan dan pemukiman dilanjutkan dan diarahkan untuk memenuhi tempat tinggal bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah dan rendah yang memenuhi teknis bangunan, sosial budaya, kesehatan dan kesusialaan. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman, perlu ditingkatkan kerja sama secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, usaha negara, usaha swasta dan masyarakat dengan mengindahkan persyaratan minimum bagi perumahan, memperluas lapangan kerja, mendorong berkembangnya industri bahan bangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

27. Pembinaan olah raga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kondisi kesehatan fisik, mental dan rohani manusia Indonesia dalam pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas serta pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya agar dapat meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional.

Peningkatan prestasi olah raga perlu digalakkan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang mantap dan terpadu serta dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kotamadya Surakarta, Dibarengi dengan upaya pembibitan secara dini serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

28. Pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang langsung mendukung dan mengembangkan kehidupan beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa melalui kegiatan pemberian bantuan-bantuan sarana peribadatan, perpustakaan sebagai pusat informasi keagamaan, pendidikan agama serta pondok pesantren.

Memperluas dan meningkatkan mutu pelayanan melalui pelatihan tenaga keagamaan, pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan haji. Mengembangkan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan mutu kehidupan beragama. Melaksanakan kegiatan penerangan agama dilingkungan remaja dan pemuda.

29. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, terutama kalangan akademis dan pengusaha siarahkan untuk mempercepat terwujudnya ketangguhan serta keunggulan bangsa. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditunjang kemampuan pemanfaatannya, pengembangan dan penguasaan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang dalam hubungan yang dinamis dan efektif antara

pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, rekayasa dan produksi barang dan jasa.

Pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi terus ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya dan lingkungan hidup.

Pembangunan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan untuk mencapai produktivitas, efisiensi dan efektifitas penelitian dan penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah serta memberikan pemecahan masalah konkrit dalam pembangunan.

30. Pembangunan hukum diarahkan terwujudnya pelaksanaan hukum dan membantu terwujudnya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar '45 melalui peningkatan kualitas aparat pelaksana hukum, sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum untuk menciptakan kehidupan aman dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan, tata hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakkan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan yang makin lancar.
31. Pembangunan politik diarahkan pada pembaharuan kehidupan politik untuk meningkatkan fungsi infra struktur politik serta interaksi politik antara keduanya sesuai dengan Demokrasi Pancasila; meningkatkan kemampuan, kualitas dan kemandirian infrastruktur politik; menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan politik; mengembangkan dan meningkatkan budaya politik melalui upaya pemahaman dan pengamalan moral, etika dan sikap politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
32. Pembangunan Otonomi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 diarahkan untuk lebih mengembangkan dan memacu pembangunan daerah, memperluas peran serta masyarakat, serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah dan secara saling mendukung dengan kemampuan daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah dan kemampuan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan pada perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.
33. Pembangunan aparat pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk mewujudkan aparat pemerintah daerah yang handal serta mampu

melaksanakan keseluruhan penyelenggara tugas pemerintah umum dan pembangunan dengan efisien, efektif dan terpadu.

Di samping itu pembangunan aparatur pemerintah daerah juga diarahkan untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional, bertanggungjawab, bersih dan berwibawa serta menunjang tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan. Pendayagunaan aparatur pemerintah daerah terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas efisensi pelayanan dan mengayomi kepada masyarakat.

34. Pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa diarahkan kepada terlaksananya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pemasyarakatan dasar pemikiran dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan nasional serta hasil-hasil yang berwawasan jatidiri dalam rangka wawasan nusantara, ketahanan daerah sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan, memperlancar keterpaduan gerak pembangunan di segala bidang, serta mendukung kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
35. Pembangunan Petahanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat diarahkan agar setiap warga negara menyadari akan hak kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 melalui pendidikan pendahuluan bela negara. Hakekat kemanunggalan ABRI-rakyat harus terus ditanamkan kedalam jiwa dan sanubari seluruh rakyat agar terwujud kekuatan pertahanan keamanan daerah yang handal serta terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan ketahanan mental idiologi yang tangguh.

## BIDANG EKONOMI

### 1. Industri

- a. Pembangunan industri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, diarahkan untuk memperkuat struktur industri sehingga mampu mendayagunakan sumberdaya termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar dalam maupun luar negeri; sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah Kotamadya Surakarta dengan keterkaitan yang kuat antara industri dengan sektor yang lain yang dapat memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan mendorong berkembangnya berbagai sektor pembangunan lainnya dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- b. Pembangunan industri yang mempunyai nilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak seperti industri tekstil, makanan dan minuman, industri wisata,

transportasi darat, perkembangannya diarahkan agar lebih dan mampu bersaing melalui peningkatan mutu dan standarisasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, mapu untuk memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan melakukan rancang bangun dan rekayasa.

- c. Industri rancang bangun dan rekayasa serta jasa konstruksi perlu dibina dan dikembangkan kemampuannya serta ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya melalui tenaga kerja yang profesional dan penciptaan iklim usaha yang menumbuhkembangkan usaha industri rancang bangun dan rekayasa serta jasa konstruksi sehingga mampu berperan dalam pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional.
- d. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan, industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional diarahkan agar menjadi usaha yang makin efisien dan mapu berkembang mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, mampu meningkatkan perannya dalam menyediakan barang dan jasa sebagai komponen baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri serta menjaga keberadaan dan kelangsungan industri tersebut dengan memberi kemudahan permodalan, perijinan maupun pemasaran, peningkatan keterkaitan dengan industri yang berskala besar dan koperasi secara efisien secara efisien yang yang saling menguntungkan melalui pola kemitraan usaha untuk meningkatkan peran dan kedudukannya dalam pembangunan industri.
- e. Untuk mendorong penemuan, inovasi serta peningkatan mutu dan efisiensi industri, perlindungan hak milik intelektual, hasil penelitian dan pengembangan industri dan standarisasi perlu disempurnakan. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan kecintaan terhadap produksi dalam negeri.

## 2. Pertanian

- a. Pembangunan pertanian disesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah Kotamadya daerrah Tingkat II Surakarta. Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan diarahkan pada perkembangan pertanian yang maju dan efisien yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani.
- b. Pembangunan pertanian diarahkan pada penggunaan tanah produktif dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui program intensifikasi dan diversivikasi, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Pembangunan pertanian tanaman pangan diarahkan untuk tetap mempertahankan swasembada beras menuju kemantapan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mencukupi gizi melalui penganekaragaman jenis bahan pangan.

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan dengan meningkatkan produktifitas usaha tani persatuan luas lahan pertanian, peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan sejenisnya dengan di dukung oleh peningkatan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana yang makin memadai, penanganan pasca panen yang makin efisien.

- d. Pembangunan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan komoditi ekspor dan memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri melalui peremajaan, perbaikan mutu tanaman dan penganekaragaman jenis komoditi.

Peningkatan produksi komoditi perkebunan perlu penanganan secara intensif dengan meningkatkan pemanfaatan lahan perkebunan dan sejenisnya melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri yang didukung pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana yang makin memadai.

- e. Pembangunan perikanan lebih diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi serta keperluan ekspor melalui peningkatan dan diversifikasi produksi perikanan. Budidaya ikan air tawar dikembangkan melalui pengembangan dan penerapan teknologi maju dan teknologi tepat guna yang dapat menguntungkan petani pemelihara ikan.
- f. Pembangunan peternakan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat yang dilaksanakan melalui peningkatan usaha diversifikasi dan intensifikasi ternak kecil dan unggas yang di dukung usaha pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Penerapan hasil penelitian dan pengembangan pertanian diarahkan pada usaha meningkatkan dan mengembangkan mutu dan keterkaitan antar lembaga penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat petani untuk mengelola dan mengembangkan usaha taninya melalui koordinasi lintas sektoral yang mantap.

### 3. Tenaga Kerja

- a. Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi serta produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha.

- b. Pengadaan tenaga kerja yang merupakan bagian dari kebijaksanaan perencanaan ketenagakerjaan daerah harus mendorong pemerataan kerja. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial Pancasila menuju ke peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan didukung organisasi pekerjaan dan koperasi yang dipimpin dan dikelola pekerja sendiri secara efisien dan efektif untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Penyandang cacat sebagai bagian dari angkatan kerja di daerah perlu dibina dan didorong untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- c. Peningkatan kesadaran akan produktifitas, efisiensi, efektifitas dan kewirausahaan serta etos kerja produktif dilaksanakan melalui berbagai kegiatan motivasi, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Rencana ketenagakerjaan daerah perlu dikembangkan terus dan disempurnakan secara terarah, terpadu dan menyeluruh. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat harga diri kaum pekerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, pemagangan di lingkungan kerja pada sektor-sektor kegiatan ekonomi. Peningkatan kualitas tenaga kerja daerah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat serta badan usaha yang menggunakan tenaga kerja. Kerja sama antara lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha negara dan swasta dan organisasi organisasi pekerja, lembaga kemasyarakatan perlu dikembangkan.
- e. Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan kerja, kesehatan kerja, jaminan sosial yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian serta syarat-syarat kerja yang lain dikembangkan secara terpadu dan bertahap dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneter, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberi kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. Khusus bagi tenaga kerja wanita perlu mendapat perhatian dan perlindungan sesuai dengan kondisi harkat dan martabatnya.
- f. Kebijaksanaan pengupahan dan penggajian didasarkan kepada kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga pekerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri. Pengupahan dan penggajian dan kondisi kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja industrial Pancasila perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serikat pekerja sebagai wadah dan badan



kolektif dalam perekonomian, demikian koperasi tenaga kerja terus dikembangkan agar makin berperan dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional, etos kerja produktif serta harkat dan martabat pekerja.

- g. Pengiriman tenaga kerja daerah ke luar daerah dan luar negeri yang pada hakekatnya merupakan ekspor jasa yang menghasilkan devisa diselenggarakan secara efisien dan dengan memberikan kemudahan serta perlindungan yang diperlukan baik di luar daerah maupun di luar negeri sebagai bagian dari perencanaan ketenagakerjaan daerah dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan negara. Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja yang ada di daerah secara optimal serta mendorong alih teknologi.

#### 4. Perdagangan

- a. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri, memperlancar arus dan pemerataan distribusi barang dan jasa. Di samping itu untuk meningkatkan ekspor non migas ditngkatkan pula penyebaran informasi perdagangan, penataan sistem pasar, peningkatan daya saing komoditi ekspor.
- b. Kegiatan impor diarahkan pada impor barang-barang yang mendorong perkembangan industri daerah khususnya barang-barang modal, bahan baku dan bahan penolong suku cadang yang strategis dan teknologis.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut perlu peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, mutu, produk, promosi, kerjasama perdagangan lokal, regional, dalam negeri dan luar negeri, pembinaan golongan ekonomi lemah, pedagang informal dan tradisional, serta memasyarakatkan peraturan-peraturan perdagangan.
- d. Pedagang-pedagang informal dan tradisional perlu dilindungi, dikembangkan untuk lebih efisien, dan keberadaannya tetap diakui sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi, yang mampu berperan untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan norma, etika dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e. Kerjasama antara usaha besar, menengah dan kecil termasuk usaha informal dan tradisional terus di dorong perkembangannya dalam suasana kemitraan usaha yang saling mendukung dan saling menguntungkan.

#### 5. Transportasi

- a. Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi daerah yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib,

lancar, aman, nyaman, dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi daerah serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan antar daerah, untuk lebih menetapkan perkembangan kehidupan masyarakat.

- b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, lebih memantapkan dan keterpaduan pembangunan antar sektor, melalui usaha pengembangan pola distribusi barang dan jasa informasi di daerah.
- c. Mengusahakan dan mengembangkan transportasi kota, yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat, secara tertib, aman, nyaman dan efisien.

## 6. Dunia Usaha

- a. Pembangunan dunia usaha di daerah meliputi usaha pemerintah daerah, usaha swasta dan koperasi diarahkan agar dunia usaha tersebut tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dengan lebih meningkatkan keterkaitan usaha antar sektor dan kecil berdasarkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan sekaligus meningkatkan penanaman modal di daerah.
- b. Pengembangan dunia usaha di daerah diarahkan pada upaya peningkatan antara koperasi, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I, Badan Usaha Milik daerah Tingkat II, Usaha Swasta untuk mencegah penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat, dengan lebih meningkatkan kemampuan usaha dan memperkokoh jaringan usaha kegiatan ekonomi.
- c. Peranan usaha kecil terus dikembangkan dengan lebih meningkatkan penyediaan prasarana usaha, pengembangan iklim usaha, penyederhanaan perijinan dan kemudahan dalam melakukan investasi serta penyediaan permodalan. Pengembangan usaha kecil perlu ditunjang dengan kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, bimbingan manajemen serta alih teknologi.
- d. Pemberian berbagai bimbingan teknis dan informasi dikalangan generasi muda, koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah perlu ditingkatkan dan dikembangkan guna menumbuhkan sikap kewirausahaan, peningkatan kemampuan berproduksi serta kemampuan menciptakan daya saing pemasaran hasil produksi dan jasa dan mampu memanfaatkan setiap peluang.

- e. Peningkatan usaha informal dan tradisional sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat merupakan kegiatan ekonomi nyata yang makin meluas, oleh karena itu keberadaan usaha ini perlu terus dibina dan dilindungi agar tumbuh menjadi unsur kekuatan yang andal, mandiri dan maju serta mampu berperan dalam menciptakan kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan.

Pembinaan ekonomi rakyat diutamakan pada pengembangan kewiraswastaan, penyediaan sarana dan pra sarana, fasilitas pendidikan dan latihan, bimbingan dan penyuluhan serta kemudahan memperoleh permodalan.

- f. Peningkatan upaya promosi untuk produk-produk dan kesempatan berusaha dengan cara memperkenalkan/ informasi ke manca negara dalam rangka mengantisipasi sistem perekonomian global yang terus berkembang, serta meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk di Jawa tengah sekaligus akan mendorong pengembangan industri, daerah produksi dan peningkatan lapangan kerja.

## 7. Pariwisata

Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan, dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan pendapatand aerah dan masyarakat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna mendorong kegiatan ekonomi, sehingga dapat terselenggara pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga terpeliharanya kepribadian bangsa, terpeliharanya nilai agama, memupuk rasa cinta alam serta kelestariannya dan terjaganya mutu lingkungan.

## 8. Pos dan Telekomunikasi

- a. Pembangunan Pos ditingkatkan dan dikembangkan melalui jangkauan jasa pos dan giro yang makin meluas dan makin memasyarakat, agar masyarakat luas memperoleh pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya arus barang dan jasa, giro yang lancar dan aman dengan di dukung oleh peningkatan kemampuan sumberdaya manusia serta oleh pemanfaatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Telekomunikasi dikembangkan menjadi wahana yang dapat diandalkan untuk terselenggaranya arus lintas informasi dan data secara lancar, jelas dan tepat guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan pembangunan. Jaringan dan jangkauan telekomunikasi terus diperluas dengan menggunakan teknologi maju serta meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan dengan didukung oleh peningkatan kemampuan sumberdaya manusia serta oleh pemanfaatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 9. Koperasi

- a. Pembangunan koperasi diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Pengembangan koperasi perlu terus ditingkatkan ke arah kemandirian dan mampu memajukan kesejahteraan anggotanya.
- b. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi terus ditingkatkan melalui upaya peningkatan pengelolaan koperasi secara profesional dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan koperasi melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta memberi kesempatan pada lembaga koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi serta bekerja sama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung.
- c. Pengembangan koperasi diarahkan pada peningkatan kerja sama antar koperasi dan antara koperasui dengan badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I. Badan Usaha Milik Daerah tin gkat II, usaha swasta sebagai mitra usaha secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha dan kesetiakawanan serta saling mendukung dan saling menguntungkan.

## 10. Pembangunan daerah

- a. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Pembangunan daerah juga diarahkan untukm menaggulangi masalah-masalah pokok pembangunan daerah dan pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui pemanfaatan potensi daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan daerah akan lebih meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menciptakan kemandirian daerah, suatu kerangka kerjasama antar daerah yang lebih mampu memperkuat peran daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
- b. Pembangunan perkotaan semakin ditingkatkan melalui upaya fungsi kota sesuai dengan herarkinya.  
  
Peningkatan fungsi kota mencakup peningkatan fungsi integral kota dalam pelayanan kepada masyarakat kota dan peningkatan fungsi eksternal kota dalam hubungannya dengan kota-kota lain maupun dengan wilayah belakangnya yang kesemuanya akan diakomodasikan dalam rencana tata ruang kota. Peningkatan fungsi kota menuntut pola peningkatan manajemen kota yang efisien untuk menciptakan suasana perkotaan yang sehat, rapi, aman dan nyaman yang mampu mendorong dan mendukung pembangunan regional.
- c. Penatagunaan tanah yang terdiri dari penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan

ruang agar dapat dijamin peningkatan kualitas ruang. Penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di daerah Kotamadya daerah Tingkat II surakarta, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

- d. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak atas tanah, pencegahan penelantaran tanah, batas maksimum pemilihan tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.
- e. Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelolaan tanah yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan, serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Kegiatan pengembangan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditinjau dengan perangkat analisis dan perangkat informasi pertanahan yang baik.

## 11. Keuangan Daerah

- a. Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan dan daya guna seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan keuangan daerah dalam menunjang kesinambungan pembangunan daerah dan peningkatan kemandirian. Kemandirian ini tercermin pada semakin meningkatnya kemampuan keuangan daerah yang handal, efisien dan mampu memenuhi kebutuhan tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat, melusanya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan upaya peningkatan tabungan masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
- b. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat pencapaian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan dinamis, serta mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan antara pusat, Daerah tingkat I, daerah Tingkat II yang sertasi dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis. Disamping itu keuangan daerah harus didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis dengan memungkinkan dibentuknya dana cadangan yang dapat dimanfaatkan apda saat penerimaan daerah tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak.
- c. Penerimaan daerah terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua penerimaan daerah terutama sumber penerimaan perpajakan dan sumber lainnya dengan memperhatikan peningkatan pembiayaan pembangunan serta kemampuan masyarakat dan dunia usaha, penggunaan keuangan daerah direncanakan secara cermat berdasarkan

prioritas yang tajam agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Berbagai perangkat fiskal yang meliputi perpajakan dan berbagai bentuk pendapatan daerah lainnya yang sah, dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan dengan meningkatkan peran pajak sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta perpajakan terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.

- e. Sistem penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah perlu ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Penganggaran untuk pengeluaran rutin dan pembangunan perlu lebih diserasikan serta dimantapkan menurut perencanaan penganggaran yang berlanjut dan makin meningkat dengan orientasi yang maksimal.

- f. Badan Usaha milik daerah dan unit-unit usaha milik daerah lainnya ditingkatkan efisiensi dan produktifitasnya sehingga semakin mampu berperan dalam pembangunan dan ikut berperan dalam membiayai pembangunan.

- g. Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang ada di daerah Kotamadya Surakarta harus mampu berperan sehingga dapat menjadi penggerak dan sarana mobilitas dana masyarakat yang efektif dan sekaligus sebagai pengatur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif.

Lembaga-lembaga tersebut terus ditumbuhkan dan diperluas penyebarannya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu mendorong, merangsang dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan produktifitas.

Pemberian kemudahan dalam memberikan kredit bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi terus ditingkatkan dalam rangka memperluas dan meratakan lapangan usaha.

- h. Penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing terus didorong bagi kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan melalui pengembangan iklim yang menarik prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar serta peraturan yang konsisten sehingga memberikan jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi penanaman modal asing diperlukan untuk kegiatan pembangunan yang belum mampu ditanggulangi dengan modal kemampuan teknologi dalam negeri.

- i. Pendapatan asli daerah ditingkatkan melalui penggalian sumber dari pajak daerah, pungutan daerah, perusahaan daerah dan unit-unit usaha milik daerah disamping bantuan pusat, bantuan daerah tingkat I, Pinjaman daerah, investasi di daerah dengan meningkatkan efisiensi dan penggunaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 12. Transmigrasi

- a. Penyelenggaraan transmigrasi terus disempurnakan melalui perencanaan terpadu dengan sektor pembangunan lain serta koordinasi pelaksanaan dengan pemerintah tempat tujuan transmigrasi yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah asal transmigran, melalui penyuluhan, penerangan dan pelayanan dengan mengikutsertakan pihak swasta, serta identifikasi lokasi prioritas pengiriman transmigran dalam rangka optimalisasi peran transmigrasi terhadap pembangunan.
- b. Penyelenggaraan transmigrasi jasa industri dan sektor yang lain akan terus dikembangkan untuk dapat memberikan kesempatan tenaga kerja diluar sektor pertanian serta mendorong pengembangan minat transmigrasi swakarsa.

## 13. Energi

- a. Pembangunan energi diarahkan pada upaya pemenuhan Kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan pelayanannya. Untuk menjaga kelestarian sumber energi perlu diupayakan secara cermat keanekaragaman dan penggunaan berbagai sumber energi secara optimal.
- b. Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik diarahkan agar dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik termasuk distribusi jaringan yang merata termasuk penggunaan energi listrik alternatif.

## 14. Lingkungan Hidup

- a. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian lingkungan dalam keseimbangan yang dinamis agar dapat menjamin pembangunan berkesinambungan dengan tujuan untuk memelihara mutu lingkungan melalui berbagai perlindungan dan rehabilitasi.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia dan penegakkan hukum untuk mengendalikan terjadinya pencemaran terus ditingkatkan melalui penerangan dan pendidikan.

- c. Rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak, penyelamatan daerah resapan dan daerah aliran sungai terus ditingkatkan. Untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi masa kini maupun generasi masa mendatang maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan akan terus diupayakan dengan mendorong peran aktif semua pihak.

## **BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

### 1. Kesejahteraan Sosial

- a. Pembinaan kesejahteraan sosial diarahkan pada cakupan penanganan keluarga miskin, penyandang permasalahan sosial dengan mengutamakan pembebasan anggota masyarakat dari kemiskinan, keterlantaran dan masalah-masalah sosial lainnya.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat keluarga melalui pembinaan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang berpenghasilan rendah, pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga pengentasan penyandang masalah sosial serta merupakan jiwa perjuangan dan pengabdian para pahlawan; bantuan dan penyantunan bagi golongan masyarakat miskin, terlantar, para penyandang cacat dan korban bencana alam.

### 2. Pendidikan

- a. Penataan pendidikan di daerah sejalan dengan penataan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.
- b. Iklim belajar dan mengajar dikembangkan terus yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri dan budaya belajar dikalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif dan berkeinginan untuk maju.
- c. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat, oleh karena itu pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- d. Pembangunan pendidikan di daerah diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan mengutamakan peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan pendidikan kejuruan, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Sejalan dengan hal itu dimuka



maka perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap terpadu dan efisien dalam pelaksanaannya sehingga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dalam pembangunan.

- e. Pembangunan pendidikan di daerah diarahkan juga untuk melanjutkan, meningkatkan, memperluas dan memantapkan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan penghayatan dan pengamalan Pancasila, pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan sejarah Perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan, memupuk dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda di semua jenis dan jenjang pendidikan formal, non formal maupun di masyarakat.
- f. Pembangunan pendidikan di daerah diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar dan kesempatan untuk memperoleh ketrampilan di semua jenis dan jenjang pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat. Perhatian khusus harus diberikan pada anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan bakat dan prestasinya.
- g. Pembinaan terhadap pendidikan di lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan pendidikan pra sekolah disamping sebagai wahana sosialisasi awal sebelum pendidikan dasar, terus dikembangkan agar lebih mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, penanaman pengenalan agama budi pekerti serta dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana yang membantu peletakkan dasar kearah pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta.
- h. Pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan pelatihan ketrampilan perlu ditingkatkan kualitasnya dan diperluas dalam rangka mengembangkan sikap, mental, minat, bakat, ketrampilan dan kemampuan anggota masyarakat serta mempersiapkan dan memberi bekal kepada warga belajar agar mampu bekerja dan berwirausaha serta meningkatkan martabat dan kualitas hidupnya.
- i. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi, lembaga penelitian serta lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah.
- j. Meningkatkan dan mempertinggi mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik sebagai bahasa nasional agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperluas penerapan maupun penggunaannya di masyarakat tanpa mengabaikan pengembangan bahasa daerah. Disamping itu perlu meningkatkan kemampuan berbahasa asing untuk memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan berkomunikasi dalam masyarakat Internasional.

- k. Meningkatkan dan mendayagunakan pra sarana dan prasarana pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada semua jenjang.
  - l. Meningkatkan kualitas guru serta tenaga kependidikan lainnya pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara terpadu dalam jumlah yang memadai.
  - m. Mengembangkan kurikulum secara dinamis, serasi, seimbang dengan memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penulisan, penerjemahan, penggandaan buku-buku pelajaran, buku bacaan anak, buku ilmu pengetahuan dan teknologi guna membantu peningkatan kualitas pendidikan dan wawasan pengetahuan.
3. Kebudayaan
- a. Kebudayaan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang merupakan perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat, sebagai salah satu identitas daerah yang merupakan bagian dan sekaligus sebagai penunjang kebudayaan nasional adalah modal dasar dalam pembangunan daerah.
  - b. Pembangunan kebudayaan daerah diusahakan melalui penggalian, pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan kebudayaan daerah.
  - c. Pembangunan kebudayaan daerah diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam memahami, mengamalkan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya daerah. Dalam proses pembangunan budaya daerah perlu dicegah sikap feodal, sikap eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit serta pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Perubahan dan pembauran struktur dan nilai budaya masyarakat yang sesuai dengan jati diri daerah dan kebutuhan pembangunan terus digerakkan untuk memantapkan landasan spiritual dan etik pembangunan yang berdasarkan Pancasila.
  - d. Dalam pembangunan budaya daerah yang merupakan komponen budaya nasional perlu diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, sikap yang menghargai prestasi, berani bersaing, mampu menyesuaikan diri dan kreatif. Perlu terus ditumbuhkan budaya menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, budaya belajar, budaya ingin maju serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perlu dikembangkan pranata sosial budaya yang dapat mendukung proses pematapan budaya bangsa.
  - e. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia serta penggunaannya secara baik dan benar.
  - f. Membina, melestarikan dan mengembangkan bahasa Daerah (bahasa Jawa) dalam rangka mengembangkan dan memperkaya perbendaharaan Bahasa Indonesia dan Khasanah

kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa. Bahasa daerah perlu terus dipelihara agar tetap menjadi ungkapan budaya masyarakat yang mendukung kebhinekaan budaya sebagai unsur kreativitas dan sumber kekuatan bangsa.

- g. Mengembangkan kesenian daerah sebagai ungkapan budaya daerah sehingga mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, meningkatkan apresiasi seni masyarakat, memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati seni budaya daerah serta membangkitkan semangat dan gairah membangun.
- h. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan tradisi dan peninggalan sejarah untuk menumbuhkan semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan daerah dan bangsa.
- i. Meningkatkan usaha-usaha pembauran disegala bidang kehidupan baik bidang ekonomi maupun bidang sosial budaya dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- j. Meningkatkan penggalian, perlindungan dan pelestarian budaya dan cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Perencanaan tata ruang disemua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.

#### 4. Kesehatan

- a. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi kualitas sumber daya manusia, kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, mendorong makin meningkatnya peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat sehingga masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.
- b. Pembangunan kesehatan terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, kelompok masyarakat dengan resiko tinggi, khususnya bayi, anak balita, ibu, usia lanjut, dengan eningkatkan dan memperluas serta mendekatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau oleh masyarakat dengan selalu memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan disamping dikembangkan cara pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.
- c. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan terutama melalui upaya peningkatan dan pencegahan yang dilakukan secara serasi dan seimbang dengan meningkatkan kesehatan masyarakat dan keluarga serta peningkatan dan pencegahan penyakit menular, penyehatan lingkungan pemukiman, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, disamping upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, dengan memperluas, penyuluhan kesehatan serta

pelayanan kesehatan ibu dan anak, perlindungan terhadap penyalahgunaan obat dan zat adiktif serta narkotika terutama bagi generasi muda.

- d. Peningkatan pelayanan kesehatan secara lebih luas, terpadu, dinamis dan merata, meningkatkan dan mengembangkan warisan budaya mengenai pengobatan tradisional dengan menggali, meneliti, menguji dan mengembangkan mutu obat-obatan, disamping perlu terus didorong langkah-langkah budaya tanaman obat-obatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan. Perhatian khusus diberikan terhadap pelayanan kesehatan kepada fakir miskin, anak-anak dan penduduk usia lanjut yang kurang mampu dan terlantar.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajemen dengan sistem informasi yang mantap serta upaya pengembangan hukum di bidang kesehatan. Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat di sektor kesehatan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

## 5. Keluarga Sejahtera

- a. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuhkan dan dikembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi rasa tanggungjawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- b. Gerakan keluarga berencana sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.
- c. Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin mebudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan peserta keluarga berencana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, etik, dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.
- d. Peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penerangan, bimbingan dan penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera makin memasyarakat dan membudaya.

## 6. Anak dan Remaja

- a. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragam dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan masyarakat.
- b. Pembinaan anak dimulai sejak anak dalam kandungan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dengan mempertinggi kualitas mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani dan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, Pembinaan anak dibawah usia lima tahun diupayakan terutama dengan meningkatkan gizi anak, pembinaan awal dalam berperilaku kehidupan beragama dan berbudi pekerti luhur serta memberikan kesempatan bermain bersama dalam rangka menumbuhkan daya cipta hidup bermasyarakat.
- c. Pembinaan anak usia sekolah dilakukan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan perilaku terpuji, penanaman rasa cinta tanah air, disiplin dan mandiri, menumbuhkan minat baca, menulis berhitung dan belajar, meningkatkan daya cipta, daya analisis, prakarsa dan daya kreasi, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat dan hidup bermasyarakat serta meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- d. Pembinaan remaja dilakukan melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , pembiasaan dan berperilaku terpuji, sikap mandiri, berprestasi dan bertanggungjawab, peningkatan budaya membaca dan budaya belajar, penumbuhan kemampuan daya nalar, kemampuan berinisiatif dan berfikir kritis analitis; pengembangan kreatifitas dan ketrampilan ; peningkatan gizi dan peningkatan kesehatan jasmani ; penanaman kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat; zat aditif dan narkoba; kepekaan terhadap lingkungan dan penanaman wawasan kebangsaan serta upaya menumbuhkan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai pengamalan Pancasila.
- e. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan peranannya sebagai pendidik pertama dan utama, serta peningkatan perhatian terhadap anak seusia-usia tahap perkembangannya. Orang tua juga dituntut lebih menyadari betapa besarn peranannya sebagai panutan dan teladan bagi anak dan remaja ; dengan menciptakan suasana kekeluargaanya yang harmonis, sejahtera lahir dan batin.

## 7. Pemuda

- a. Pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan insan pembangunan diarahkan agar pemuda menjadi kader pimpinan bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, peka, mandiri, beretos kerja keras, tangguh, mempunyai idealisme yang kuat, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan, baik tantangan masa kini maupun masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan dan pengembangan pemuda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda dalam membangun masa depan bangsa dan negara.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan pemuda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah dan pemuda itu sendiri melalui upaya pemantapan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menanamkan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memperkokoh kepribadian, meningkatkan disiplin, mempertinggi budi pekerti, meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas memperkuat semangat belajar dan etos kerja, serta memiliki keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas pemuda dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentuk insan yang berjiwa Pancasila, demokratis, patriotik dan berwawasan kebangsaan; diselenggarakan terutama melalui penetapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sehingga lebih memantapkan keyakinan pemuda akan Kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya asas. Peran serta pemuda dalam kehidupan politik nasional dan kegiatan internasional terus ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai ipaya pendidikan politik sehingga proses kaderisasi dapat berlangsung secara wajar dan berkesinambungan.
- d. Pengembangan kepeloporan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara harus diupayakan agar pemuda memiliki jiwa kejuangan, keperintisan, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan sikap mandiri serta memilikisikap tanggung jawab, inovatif, kreatif, ulet, tangguh, jujur serta berani dan rela berkorban dengan dilandasi semangat cinta tanah air.
- e. Pemuda sebagai kader bangsa dan kader pembangunan perlu terus didorong untuk meningkatkan kebiasaan gemar membaca, semangat dan kemauan belajar dan bekerja keras untuk mengembangkan kecerdasan, keahlian, ketrampilan, serta daya nalar, berpikir analitis,

dan tanggap terhadap tantangan dan lingkungan serta ,mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi.

- f. Perlu diciptakan suasana yang lebih sehat, dinamis dan demokratis sejalan dengan dinamika pembangunan sehingga terwujud iklim yang mendorong bagi pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan. Fungsi dan peranan organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia, organisasi siswa intra sekolah, organisasi kemahasiswaan, pramuka dan karang taruna, terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih mandiri, berkualitas, dan lebih mempunyai semangat kebangsaan; yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

#### 8. Peranan Wanita Dalam Pembangunan

- a. Wanita baik sebagai warganegara maupun sebagai sumber daya insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan. Oleh sebab itu kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan untuk meningkatkan peran serta dan sumbangannya bagi pembangunan daerah, sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita sebagai mitra sejajar dengan kaum pria semakin mantap di bidang pembangunan.
- b. Peranan wanita dalam pembangunan dikembangkan selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk pengembangan generasi muda, terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, serta kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilannya, terutama untuk lebih memanfaatkan kesempatan kerja diberbagai bidang. Sejalan dengan itu perlu dikembangkan iklim sosial budaya yang lebih memungkinkan wanita untuk makin berperan dalam pembangunan.
- c. Upaya untuk mendorong partisipasi wanita dalam pembangunan, perlu makin ditingkatkan antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggerakannya.
- d. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan keterampilan, produktivitas, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja wanita serta kepada golongan wanita yang kurang mampu.

#### 9. Perumahan dan Pemukiman

- a. Pembangunan Perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui usaha-usaha penyediaan pembangunan perumahan, perbaikan perumahan agar memenuhi syarat kesehatan, rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

- b. Pembangunan Perumahan dan pemukiman harus dapat mendorong kegiatan pembangunan dengan memperhatikan prinsip swadana dan gotong royong. Penyuluhan tentang pemugaran perumahan perlu dilanjutkan dan diperluas untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam kehidupan masyarakat.
- c. Koperasi, usaha negara dan usaha swasta yang melayani pembiayaan pembangunan-pembangunan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan perumahan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah yang semakin besar. Perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan perseorangan antara izin dengan penyediaan kredit yang memadai pengaturan persewaan dan hipotik perumahan.
- d. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus mampu memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan perumahan yang murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan dalam negeri dengan mengutamakan bahan setempat.
- e. Penciptaan Lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, bersih, sehat, dan aman perlu terus ditingkatkan antara lain melalui pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih, fasilitas sosial ibadah, fasilitas ekonomi dan transportasi, fasilitas rekreasi dan olahraga, fasilitas lingkungan termasuk fasilitas penanganan limbah, disertai upaya peningkatan kesadaran dan tanggungjawab warga masyarakat agar semakin rakyat mendiami rumah sehat dalam lingkungan sehat pula.

#### 10. Olah Raga

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada kondisi kesehatan fisik, mental dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan daerah.
- b. Gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat terus ditingkatkan agar lebih meluas, untuk menciptakan budaya berolahraga dan iklim yang sehat yang mendorong peran serta aktif masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga. Perlu ditumbuhkan sikap masyarakat yang sportif dan bertanggung jawab dalam semua kegiatan keolahragaan.
- c. Dalam upaya peningkatan prestasi olah raga perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas organisasi keolahragaan di daerah.



- d. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta di lingkungan pekerjaan dan pemukiman dan pemukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat.

#### BIDANG AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar dan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
2. Diupayakan supaya terus bertambah sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk sarana pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk sekolah, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melanjutkan usaha-usaha untuk terus meningkatkan pelayanan dan kelancaraan penunaian ibadah haji bagi umat islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
4. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama, oleh karena itu pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
  - a. Agar tidak mengarah terhadap pembentukan agama baru.
  - b. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

#### BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Teknik Produksi
  - a. Pengembangan teknik Produksi diarahkan untuk mempercepat penguasaan proses produksi, meningkatkan produktivitas, kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja dalam mendayagunakan teknologi bagi peningkatan proses pertambahan barang dan jasa yang

bermutu dan berdaya saing sehingga mampu mengacu proses industrialisasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan makin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Mengembangkan rencana produksi manufaktur progresip agar terjamin transformasi teknologi secara berkesinambungan dan terarah, sehingga perkembangan teknik produksi barang dan jasa di luar negeri dapat diikuti, dipelajari dan dipahami penerapannya disertai dengan upaya penyesuaian, peningkatan keterampilan berproduksi, keahlian organisasi dan manajemen.
- c. Meningkatkan mutu dan prestasi kerja melalui usaha peningkatan keterampilan, penerapan standar mutu dan pemeliharaan persyaratan kerja untuk mendorong terbentuknya sikap dan perilaku masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Meningkatkan penguasaan teknik produksi dalam mengembangkan industri, kemampuan rancang bangun dan rekayasa ahar barang adn jasa yang dihasilkan lebih bermutu.

## 2. Teknologi

- a. Meningkatkan kemampuan pengusaan teknologi dan rekayasa untuk memacu kemampuan melakukan inovasi serta percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan untuk mengkaji dan memahami teknologi yang tepat melalui kajian berbagai ilmu pengetahuan terapan, serta mengembangkan kemampuan alih teknologi untuk menghasilkan produk baru.
- c. Mengembangkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa dengan mendorong penyempurnaan proses produksi serta pertumbuhan berbagai proses produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mampu menghadapi persaingan pasar dalam dan luar negeri.
- d. Meningkatkan kerjasama berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam mengembangkan teknologi, rancang bangun dan rekayasa agar dapat memperkirakan kecenderungan perkembangan teknologi yang terus makin meningkat.

## 3. Ilmu Pengetahuan Terapan

- a. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan terapan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan melalui pengembangan dan penguasaan secara lebih meluas ilmu pengetahuan dasar dan kegiatan penelitian baik dilingkungan perguruan tinggi maupun di masyarakat.
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan pendalaman berbagai ilmu pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan pendayagunaan ilmu pengetahuan terapan untuk menghasilkan teknologi yang tepat guna bagi berlangsungnya kegiatan pembangunan.

- c. Meningkatkan penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan terapan melalui peningkatan mutu dan jumlah tenaga peneliti yang mempunyai keahlian khusus, berdedikasi, berprakarsa, kreatif dan inovatif.
  - d. Mendayagunakan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan terapan di berbagai lembaga penelitian dan pengembangan.
4. Ilmu Pengetahuan Dasar
- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dasar untuk mendukung peningkatan mutu dan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk dapat mempercepat pembangunan.
  - b. Meningkatkan dan menumbuhkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dasar untuk memberi landasan yang kuat pengembangan ilmu pengetahuan alam, sosial dan humaniora yang bersifat dinamik, terbuka serta dapat mengantisipasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat.
  - c. Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dasar diberbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
5. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- a. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas seluruh kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan koordinasi, keterkaitan antar lembaga, pembinaan etika profesi ilmiah, pemanfaatan sistem informasi antar lembaga, perlindungan bagi ilmuwan, penemu dan peneliti bagi hasil ilmiah dan penemuannya.
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat secara luas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mempercepat proses perwujudan masyarakat yang sadar peran dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan.
  - c. Meningkatkan kerjasama antar lembaga-lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan. Menciptakan hubungan yang saling mengisi antar lembaga melalui koordinasi yang baik antar lembaga pendidikan, lembaga penelitian lintas sektoral dan multi disiplin, lembaga pengkajian dan penerapan teknologi di industri serta lembaga lainnya.
  - d. Mengembangkan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar lebih produktif, kreatif, inovatif serta mendukung mutu dan daya guna ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih efektif dalam memacu pertumbuhan produktivitas, prestasi daerah maupun nasional.

- e. Meningkatkan jaringan informasi hasil penelitian kepada masyarakat melalui publikasi dan pengembangan pelayanan pusat dokumentasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta perpustakaan di daerah.

## BIDANG HUKUM

- a. Pembentukan Hukum Diselenggarakan melalui proses cara secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan-ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tatanilai budaya yang berlaku dimasyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ebrlaku. Produk hukum Kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan , agar hukum nasional dapat senantiasa dapat mengikuti dinamika pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.
- d. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur hukum yang memiliki kemampuan untuk mengayomi asyarakat dan mendukung pembangunan, serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparat.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsunagn berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## BIDANG POLITIK, APARATUR NEGARA, PENERANGAN KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

### 1. Politik

Pembangunan politik sebagai upaya penataan kehidupan politik diarahkan :

- a. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan tatanan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mengembangkan etika dan moral budaya politik dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan politik di daerah yang mantap sehingga hubungan

suprasstruktur dan infrastruktur politik makin berperan dan berfungsi secara efektif. Sejalan dengan itu terus ditingkatkan kesadaran dan partisipasi politik dari masyarakat termasuk upaya pemantapan keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Semakin dikembangkannya peran, fungsi, kualitas dan kemandirian organisasi-organisasi kemasyarakatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain sesuai dengan kekhususannya atas dasar kesamaan bidang kegiatan profesi, fungsi serta agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Berpedoman pada Pancasila, serta senantiasa mengarah pada kepentingan bangsa dan negara.
- c. Memperkuat kesatuan dan Persatuan mendorong prakarsa kreativitas dan peran serta masyarakat dan mempercepat upaya pemerataan pembangunan, memperlancar proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan serta makin mantapnya sistem politik yang berdasarkan Pancasila.

## 2. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antara daerah merupakan kegiatan antar daerah didalam meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan antara daerah melalui upaya peningkatan pemanfaatan potensi yang ada untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah.

## 3. Aparatur Pemerintah Daerah

Pembangunan aparatur pemerintah daerah diarahkan :

- a. Makin terwujudnya dukungan administrasi pemerintah daerah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintah daerah yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan.
- b. Peningkatan kemampuan dan disiplin, pengendalian, keteladanan dan kesejahteraan aparat, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang makin efisien efektif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
- d. Kebijakan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparat pemerintah daerah mencakup penataan organisasi penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan prasarana dan sarana serta meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan kesejahteraannya, sejalan dengan itu pendayagunaan aparatur pemerintah daerah ditujukan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah.

#### 4. Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa diarahkan :

- a. Mendukung dan makin meningkatnya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan kemasyarakatan, sehinggamakin meningkatnya kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, memperkokoh ketahanan daerah dalam kerangka ketahanan nasional serta memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sejalan dengan dinamika pembangunan dan kemajuan teknologi.
- b. Mendukung upaya meningkatkan iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, encerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa serta mengairahkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan kehidupan demokrasi Pancasila.

### BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Perkembangan pertahanan dan keamanan masyarakat di daerah di arahkan :

- a. Pengembangan daya tangkal bangsa dan negara di daerah yang ditata dan diatur serta perwujudannya dikaitkan dengan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat, sehingga dapat memntabkan keberadaan rakyat terlatih sebagai potensi dasar dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Terwujudnya perlindungan masyarakat sebagai komponen yang handal, an selalu siap untuk menanggulangi unsur yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menanggulangi bencana alam.

### KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG

Kebijaksanaan penataan ruangdaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, merupakan kebijaksanaan yang berupaya meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai pusat pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah, batasan dan tolok ukur pembangunan perwilayahan daerah, sarana dan prasarana, pemanfaatan potensi sumber daya daerah yang optimal serta pengatur dan keterpaduan, keserasian kegiatan produksi dan distribusi barang didaerah. Dalam kebijakasanaan penataan ruang daerah fungsi dan peran kota tersebut dikembangkan berdasarkan karakteristik

potensi sumberdaya daerah yang mengarah pada unggulan kemandirian daerah serta program khusus daerah. Unggulan kemandirian dan program khusus yang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang menyangkut perkembangan fungsi kota yang meliputi : Surakarta sebagai kota pendidikan, Surakarta sebagai kota industri, Surakarta sebagai kota pariwisata budaya dan olahraga serta Surakarta sebagai kota pemerintahan.

Untuk memenuhi fungsi dan peran kota yang tertuang dalam kebijaksanaan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan diperlukan suatu penataan tata ruang daerah yang berefisiensi yang meliputi pembagian sub-wilayah pembangunan sebagai berikut :

#### 1. Sub Wilayah Pembangunan (SWP)

Kebijaksanaan pembagian Sub Wilayah Pembangunan secara umum didasarkan pertimbangan : (a) pentingnya penggerak pertumbuhan secara merata di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta; (b) pentingnya kepraktisan pola pengelolaan dan pengendalian pembangunan yang didasarkan atas kebakuan administrasi pemerintahan.

Berpijak pada dua pertimbangan tersebut maka Sub Wilayah Pembangunan (SWP) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dibagi menjadi 10 Sub Wilayah Pembangunan sebagai berikut :

a. Sub Wilayah Pembangunan I (SWP I) dengan pusat pertumbuhan di kelurahan Pucangsawit yang meliputi 6 kelurahan yaitu : Kelurahan Pucangsawit, Gandekan, Jagalan, Sangkrah, Kelurahan Sewu dan Kelurahan Semanggi.

Luas areal SWP I adalah 487,52 hektar.

b. SWP II dengan pusat pertumbuhan kelurahan kampung baru yang meliputi 12 kelurahan, yaitu : Kelurahan Kampung baru, kepatihan kulon, Kepatihan Wetan, Punggawan, Purwodiningratan, Giligan, Ketelan, Timuran, keprabon, Kestalan, Keprabon, Ketelan, Timuran, Punggawan, Stabelan, dan kelurahan Siroprajan.

Luas Areal SWP II adalah 430, 90 hektar.

c. SWP III dengan pusat pertumbuhan kelurahan Gajahan, yang meliputi 12 kelurahan yaitu Kelurahan Joyontakan, Danukusuman, Serengan, Kratonan, Jayengan, Kemlayan, Pasar Kliwon, Gajahan, Kauman, Baluwarti, Kedung lumbu, dan kelurahan Joyosuran.

Luas areal SWP III adalah 494,31 hektar.

d. SWP IV dengan pusat pertumbuhan kelurahan Sriwedari yang meliputi : kelurahan Tipes, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, Manahan dan Kelurahan mangkubuen.

Luas areal SWP IV adalah 549,43 hektar.

e. SWP V dengan pusat pertumbuhan Kelurahan Sondakan, yaitu meliputi kelurahan Pajang, kelurahan Laweyan, kelurahan Sondakan. Luas Areal adalah 258,50 hektar.

- f. SWP VI dengan pusat pertumbuhan kelurahan Jajar yaitu meliputi : Kelurahan Karang asem, Kelurahan Jajar dan Kelurahan kerten.  
Luas areal SWP VI adalah 327,60 hektar.
- g. SWP VII dengan pusat pertumbuhan Kalurahan Kadipiro, yang meliputi kelurahan Nusukan dan kelurahan Kadipiro.  
Luas areal SWP VII adalah 715,10 hektar.
- h. SWP VIII dengan pusat pertumbuhan kelurahan jebres, yang meliputi Kelurahan Jebres dan kelurahan Tegalharjo. Luas areal SWP VIII adalah 349,50 hektar.
- i. SWP IX dengan pusat pertumbuhan Kelurahan Sumber yaitu meliputi Kelurahan Sumber dan Kelurahan Banyuanyar.  
Luas Areal SWP IX adalah 532,90 hektar.
- j. SWP X dengan pusat pertumbuhan di kelurahan Mojosongo yang meliputi 1 Kelurahan yaitu mojosongo seluas 532,90 hektar.

2. Pembangunan Sanitasi, sarana dan prasarana kota.

Kebijaksanaan penataan ruang daerah selain mempertimbangkan pembagian tataruang yang berkaitan dengan penataan pertumbuhan daerah, juga mempertimbangkan dua faktor penting yang lain yaitu : (a)antisipasi gangguan fisik daerah; (b) kelancaran daya dukung fasilitas daerah. Faktor pertama yaitu antisipasi gangguan fisik daerah berkaitan dengan tata letak daerah kotamadya daerah Tingkat II Surakarta yang tergolong dataran rendahdialiri sungai Pepe, sungai jenes, Sungai Anyar dan disebelah timur dikelilingi Bengawan Sala. Berkenaan hal tersebut diatas dalam rangka pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan sekaligus merehabilitasi sumberdaya alam kesehatan, kerapian dan keindahan kota (berseri), perlu diintensifikasikan keterpaduan program jaringan sanitasi yang menjadi bagian dari pemeliharaan saat pemerintah.

Faktor kedua kelancaran daya dukung fasilitas fisik daerah, berkaitan dengan perumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat pada masing-masing sub wilayah pembangunan. Sehubungan dengan pemasalahan ini maka kebijaksanaan yang menyangkut sarana dan prasarana perkotaan antara lain prasarana peningkatan mutu jalan yang diarahkan pada kelancaran transportasi ekonomi, wisata daerah budaya, serta perbaikan kampung sebagai bagiandari usaha untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1. Umum

- a. Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang tidak terpisahkan dari pembagunan nasional dan pembangunan daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah



merupakan pelengkap pembangunan nasional; sehingga proses dan kebijaksanaan pembangunan daerah sejalan serasi dan selaras dengan pembangunan nasional ataupun pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah. Di Samping itu arah pembangunan yang dilaksanakan di Kotamadya DaERAH Tingkat II Surakarta berpedoman pada Trilogi Pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suasana peri kehidupan sosial masyarakat yang stabil dan dinamis.

- b. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kebudayaan dan kebijaksanaan pembiayaan yang menunjang kemandirian melalui peningkatan tabungan masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

- c. Kebijakan pembiayaan tetap didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran berimbang yang dinamis dengan memungkinkan dibentuknya dana cadangan pada masa penerimaan daerah melebihi yang direncanakan dan dimanfaatkan pada masa penerimaan daerah tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak guna menjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap.

Pendapatan asli daerah terus diupayakan pendapatannya dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, terutama sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak, dengan tetap memperhatikan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pengeluaran pembangunan yang direncanakan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam guna memperoleh manfaat dan produktivitas sumberdaya pembangunan yang sebesar-besarnya.

2. Langkah-langkah strategi pemenuhan pembiayaan pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta berasal dari Pemerintah : Pusat, Dati I, dan Dati II, dunia usaha dan masyarakat. Akumulasi sumber dana ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan produktivitas yang tinggi.

- a. Pembiayaan dari pemerintah

- 1) Yang berasal dari dalam negeri

- a) Sumber Pembiayaan dari pemerintah pusat.

Sumber Pembiayaan dari Pemerintah Pusat yang merupakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya merupakan sumber

pembiayaan yang berada di luar penguasaan daerah. Pembiayaan tersebut meliputi program dan proyek sektoral APBN dan berbagai program bantuan pembangunan ( INPRES ), dengan langkah-langkah strategi yang dilaksanakan yakni :

- (1) Meningkatkan kualitas perencanaan program, proyek dan antar sektor yang lebih efisien dan efektif guna mempercepat pemecahan masalah-masalah pokok secara terpadu antara sektoral dan sekaligus menunjang program –program pembangunan nasional.
  - (2) Meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek, sehingga menjamin pencapaian hasil-hasil pembangunan dengan kualitas yang baik dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- b) Sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan asli daerah.

Sumber pembiayaan ini merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang sepenuhnya dibawah penguasaan dan pengaturan pemerintah daerah. Sumber-sumber pembiayaan ini meliputi : Pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah. Langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh :

- (1) Perpajakan sebagai penerimaan daerah diarahkan pada intensifikasi dan perluasan obyek pajak, serta retribusi dengan tetap berpegang pada asas keadilan, pemerataan dan efisiensi.
  - (2) Perusahaan milik daerah dan unit-unit usaha milik daerah diarahkan untuk bekerja lebih efisien dan produktif, sehingga makin berperan dalam pembiayaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri

Sumber pembiayaan dari luar negeri merupakan pelengkap pembiayaan pembangunan dan sebagai wahana alih teknologi yang efektif. Sumber ini sebagai bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri sepanjang tidak ada ikatan politik, dan tidak memberatkan perekonomian.

Sumber Pembiayaan ini disalurkan kepada pemerintah daerah melalui pemerintah pusat, sehingga langkah strategis yang perlu ditempuh :

- a) Penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang produktif dengan prioritas yang dapat memberikan dampak produktivitas yang tinggi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b) Penyempurnaan dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai, kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi dan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Pembiayaan yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat.

1) Dalam Negeri

Sumber pembiayaan dari dunia usaha dan masyarakat adalah sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pengumpulan dana masyarakat dan dunia usaha termasuk koperasi. Dana yang berasal dari sumber ini peranannya dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar sehingga perlu pengelolaan yang semakin efisien.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu di tempuh langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a) Sumber pembiayaan dari dunia usaha terdiri dari usaha negara, swasta dan koperasi, baik yang berupa investasi langsung maupun tabungan masyarakat serta kredit perbankan terutama di daerah untuk membiayai sektor-sektor usaha yang mendapatkan prioritas dan yang bersifat cepat menghasilkan. Hal ini dimaksudkan agar lebih meningkatkan peran serta dunia usaha dalam melaksanakan investasi-investasi produktif.

Untuk itu perlu ditingkatkan dan dimantapkan usaha menciptakan iklim usaha yang merangsang dan mendorong peran serta dunia usaha baik yang berfasilitas maupun non fasilitas.

Penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang merangsang perlu didukung pula oleh usaha-usaha deregulasi dan debirokratisasi serta tersedianya informasi mengenai peluang investasi dan peluang usaha.

- b) Sumber pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat .

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan sehingga dapat semakin meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mendukung pembangunan.

Kebijaksanaan penghimpuan sumberdaya dan sumber dana dari masyarakat perlu tetap dikembangkan.

Dengan demikian peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan akan semakin besar.

Khususnya dengan lebih mendayagunakan lembaga keuangan di daerah.

2) Sumber Pembiayaan Pembangunan dari Luar Negeri

Sumber dari luar negeri ini dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) yang diarahkan pada sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan, dapat memperluas ekspor, memerlukan modal yang besar namun tidak

membahayakan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional dan tidak menghambat perusahaan nasional.

Untuk itu perlu dikembangkan iklim investasi yang menggairahkan, antara lain melalui penyerdahanaan prosedur, peningkatan kapasitas berusaha, kelancaran pelayanan serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.

Terhadap bantuan luar negeri, baik dari pemerintah maupun dari organisasi non pemerintah perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan yang sebaik-baiknya.

## BAB V PELAKSANAAN

Pola dasar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah disusun setiap lima tahun dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di semua bidang. Pelaksanaan Pola dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dituangkan dalam Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah ( 1994/1995 – 1998/1999 ) dengan memperhatikan saran-saran Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tingkat II Surakarta.

Pembangunan lima Tahun Keenam Daerah merupakan tahap awal dari pelaksanaan pembangunan daerah Jangka Panjang tahap Kedua yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap kemandirian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah setiap tahun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ( REPETEDA ) yang ditetapkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dengan tetap memperhatikan faktor kebersamaan keterbukaan, keterpaduan, kesinambungan dan keserasian pembangunan.

Untuk meningkatkan tanggung jawab keuangan daerah, maka Seluruh aparat pengawas wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan-peraturan Perundangan.

Pola Dasar pembangunan daerah perlu ditinjau kembali tiap lima tahun.

BAB VI  
PENUTUP

Upaya pencapaian tujuan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan Masyarakat.

Keberhasilan usaha-usaha pembangunan tergantung pada peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran serta disiplin dari para penyelenggara pembangunan, baik aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Tingkat I, maupun Aprat Pemerintah Daerah Tingkat II dengan meningkatkan pengelolaan Pembangunan disegala bidang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengawasan.

Hasil-hasil pembangunan diusahakan untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata berdasarkan Pancasila.

Surakarta, 28 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua,

Cap.            Ttd

Drs. MARNO. D

Cap.            Ttd

HARTOMO